

ANALISA

1985—5

**PENDIDIKAN
DAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT**



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Dewan Redaksi

Pande Radja SILALAHI

Daoed JOESOEF

Rufinus LAHUR

J. PANGLAYKIM

A.M.W. PRANARKA

M. Hadi SOESASTRO

Harry TJAN SILALAHI

Jusuf WANANDI

Clara JOEWONO

Kirdi DIPOYUDO

A. Sudiharto DJIWANDONO

Djisman S. SIMANDJUNTAK

J. Soedjati DJIWANDONO

Ronald NANGOI

Redaksi Pelaksana

Pande Radja SILALAHI

Ronald NANGOI

S. TJOKROWARDOJO

STT SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN 0126-222X

Alamat

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160,
Telepon 356532, 356533, 356534, 356535

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Tanah Abang III/27,
Jakarta 10160, Telepon 356532, 356533, 356534,
356535

ANALISA

TAHUN XIV, NO. 5, MEI 1985

PENGANTAR REDAKSI	398
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN MASALAHNYA <i>BABARI</i>	401
UNIVERSITAS TERBUKA DAN TANTANGAN BELAJAR MANDIRI <i>Iwan P. HUTAJULU</i>	412
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH MENYAMBUT MASYARAKAT BELAJAR <i>M. Bambang WALGITO</i>	424
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERANAN PERANCIS: PENDEKATAN PENDIDIKAN <i>C.P.F. LUHULIMA</i>	433
KELUARGA BERENCANA MEMBANGUN KUALITAS MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT <i>Sunarto NDARU MURSITO</i>	442
KOMUNIKASI DALAM PROSES KESATUAN DAN PERSATUAN BANGSA <i>Medelina KUSHARWANTI</i>	456

Pengantar Redaksi

Pendidikan pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat terutama karena pendidikan menyangkut kepentingan masyarakat. Melalui proses pendidikan yang sehat, warga masyarakat antara lain memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh kesempatan kerja ataupun bahkan menciptakan lapangan kerja, sesuai dengan tingkat pendidikannya. Dengan demikian, masyarakat pun dapat turut serta dalam usaha-usaha pembangunan nasional.

Walaupun demikian, harus diakui bahwa dunia pendidikan Indonesia sedang menghadapi tantangan-tantangan yang tidak begitu ringan. Akibat laju pertumbuhan penduduk yang pesat, daya tampung pendidikan menjadi terbatas, sehingga memperkecil kesempatan warga masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, kemajuan di bidang industri yang merangsang terbentuknya masyarakat kerja semakin menuntut dunia pendidikan untuk menghasilkan manusia-manusia yang terampil dan produktif. Sistem pendidikan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat kerja tentu akan sia-sia, dan inalahan akan memperbesar jumlah pengangguran.

Terbatasnya daya tampung pendidikan memang tidak lepas dari masalah kependudukan. Penambahan jumlah sarana pendidikan yang tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan penduduk jelas menimbulkan masalah daya tampung pendidikan. Oleh karena itu, pemecahan masalah pendidikan seperti itu juga diimbangi dengan pemecahan masalah kependudukan, yakni program Keluarga Berencana dan transmigrasi untuk membendung pertumbuhan penduduk tersebut.

Di bidang pendidikan sendiri, usaha-usaha yang sedang giat dilaksanakan antara lain berbentuk penyelenggaraan sekolah kejuruan, Universitas Terbuka, dan pendidikan luar sekolah. Walaupun merupakan usaha perluasan kesempatan pendidikan, penyelenggaraan-penyelenggaraan sekolah dan lembaga pendidikan seperti itu mendukung terselenggaranya suatu masyarakat

belajar, yang akan menghasilkan manusia-manusia terampil dan profesional yang siap menjawab tantangan-tantangan pembangunan nasional.

Dan perlu ditambahkan bahwa dalam mengembangkan pendidikan, bantuan atau kerjasama dengan negara-negara yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dijajaki. Keterbatasan kita dalam menguasai ilmu dan teknologi mendorong kita untuk belajar dari negara-negara yang serius mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut.

Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1985, ANALISA Mei 1985 menyoroti beberapa masalah pendidikan dan kaitannya dengan kehidupan masyarakat dewasa ini. Karangan yang pertama "Sekolah Menengah Kejuruan dan Masalahnya" ditulis oleh BABARI yang antara lain membahas kebijakan pemerintah terhadap sekolah menengah kejuruan dan unsur-unsur penting dalam sarana pendidikan tersebut, yakni kurikulum, peran guru, minat masyarakat, dan biaya sekolah. Untuk meningkatkan daya tampung dan mutu pendidikan serta untuk menyesuaikan tuntutan dari lapangan kerja dan pertumbuhan industri, pemerintah telah mengikhtiaran penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan tersebut dalam Pelita IV.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk pertama kalinya menyelenggarakan Universitas Terbuka pada 4 September 1984. Karena merupakan sistem pendidikan tinggi yang masih baru, Universitas Terbuka tidak terhindar dari kesulitan-kesulitan dalam penyelenggarannya. Lagi pula belajar mandiri, yang dituntut dalam Universitas Terbuka, merupakan tantangan tersendiri dari kalangan mahasiswa yang belum terbiasa. Iwan P. HUTAJULU membahas unsur-unsur pendidikan dalam Universitas Terbuka tersebut dan tantangan belajar mandiri dari mahasiswa.

Pendidikan luar sekolah selama ini kurang mendapat perhatian sebesar pendidikan formal. Akan tetapi peledakan kebutuhan akan sekolah menyebabkan bentuk-bentuk pendidikan luar sekolah mulai mendapat tempat. Peranan pendidikan ini memang perlu diperhitungkan karena turut mengatasi masalah ledakan kebutuhan akan sekolah dan membina masyarakat belajar. M. Bambang WALGITO menyoroti pendidikan luar sekolah tersebut dalam tulisannya "Pendidikan Luar Sekolah Menyambut Masyarakat Belajar."

Usaha mengatasi masalah-masalah kependudukan dan peningkatan pembangunan nasional berkaitan erat dengan pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan pendidikan, perencanaan tenaga kerja, dan perencanaan pengembangan adalah unsur-unsur yang perlu diharmonisasikan dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Dalam karangan yang berikutnya, C.P.F. LUHULIMA menyajikan sumbangan pemikiran mengenai pengembangan sumber daya manusia tersebut dan juga peran Perancis ditinjau dari segi pendidikan.

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu pemecahan strategis untuk mengatasi masalah kepadatan penduduk. Melalui program tersebut, diharapkan dapat tercapai masyarakat Indonesia yang sejahtera dan bahagia. Keluarga-keluarga kecil relatif mempunyai kesempatan yang lebih besar dari pada keluarga-keluarga besar untuk membahagiakan dan menyejahterakan anggota-anggota keluarga. Keluarga-keluarga yang demikian pun dapat menghasilkan manusia-manusia yang bermutu. Sunarto NDARU MURSITO membahas aspek-aspek Keluarga Berencana tersebut termasuk dampak positifnya, dalam tulisannya yang berjudul "Keluarga Berencana Membangun Kualitas Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat."

Komunikasi merupakan sarana yang cukup ampuh dalam mempersatukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bidang komunikasi yang sejakin maju akan semakin mendekatkan masyarakat Indonesia yang berinukim di wilayah-wilayah yang tersebar luas. "Komunikasi Dalam Proses Kesatuan dan Persatuan Bangsa" adalah karangan yang terakhir dan ditulis oleh Medelina KUSHARWANTI. Secara berturut-turut dibahas aspek persatuan dan kesatuan bangsa, komunikasi sebagai alat, efektivitas peran, dan komunikasi yang manusiawi.

Jakarta, Mei 1985

REDAKSI

Sekolah Menengah Kejuruan dan Masalahnya

BABARI*

Pemerintah dalam Pelita IV telah berikhtiar untuk lebih memperhatikan usaha peningkatan *daya tampung* dan *mutu pendidikan* di sekolah-sekolah menengah kejuruan dan teknologi. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan lulusan/tamatan sekolah menengah kejuruan dengan tuntutan/persyaratan dari lapangan kerja yang ada serta dengan tingkat pertumbuhan industri, baik industri konstruksi, pengolahan, manufaktur ataupun jasa perdagangan dan kegiatan usaha lainnya. Hal ini adalah sesuai dengan tujuan sekolah menengah kejuruan, yaitu membina atau mempersiapkan anak didik untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk bekerja. Oleh karena itu kurikulum sekolah menengah kejuruan seharusnya berorientasi pada lapangan kerja.

Perhatian dan tekad pemerintah untuk mengembangkan sekolah menengah kejuruan ini terlihat dalam buku Pelita IV (Jilid II, Bab XX) tentang Pendidikan. Di sekolah menengah tingkat pertama kejuruan dan teknologi pengembangan dalam arti rehabilitasi gedung sekolah, penambahan ruang kelas dan ruang/tempat praktik bersama dengan peralatan yang diperlukan akan meliputi 49 Sekolah Teknik Negeri, 15 Sekolah Kesejahteraan Keluarga tingkat Pertama Negeri dan 11 SMTP Kejuruan dan Teknologi swasta. Di samping itu juga disediakan penambahan jumlah buku-buku pelajaran pokok dan buku-buku untuk perpustakaan dan diadakan penataran bagi guru-gurunya. Di Sekolah Menengah Tingkat Atas Kejuruan dan Teknologi, pengembangan dan peningkatan daya tampung akan meliputi 145 Sekolah Teknik Menengah, 23 Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, 277 Sekolah Menengah Ekonomi Atas, 88 Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga dan Sekolah Menengah Teknologi Kerumahtanggaan, 10 Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial dan 17 Sekolah Kesenian dan Teknologi lainnya. Selain itu, akan

*Staf CSIS.

dibangun sejumlah SMTA Kejuruan dan Teknologi, di antaranya 30 Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, 40 Sekolah Menengah Ekonomi Atas, 40 Sekolah Teknik Menengah (termasuk sebuah STM Penerbangan dan beberapa STM Perkapalan dan STM Grafika), 10 Sekolah Kesenian dan Industri Kerajinan dan beberapa ratus Sekolah Pendidikan Guru termasuk Guru Pendidikan Olahraga.

Semua perencanaan itu menunjukkan bahwa pemerintah berkehendak untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan guna memasuki lapangan kerja, melalui jalur pendidikan sekolah kejuruan dan teknologi. Namun untuk mewujudkannya kita masih menghadapi masalah kebijakan dasar tentang sekolah menengah kejuruan dan teknologi, kurikulum, guru, minat masyarakat terhadap sekolah kejuruan dan teknologi, serta kaitannya dengan lapangan kerja. Masalah biaya bagi sekolah menengah kejuruan dan teknologi ini perlu juga dipikirkan sedini mungkin, karena biaya penyelenggaraan sekolah kejuruan dan teknologi lebih besar daripada biaya penyelenggaraan sekolah menengah umum.

KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TERHADAP SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Di negara kita terdapat dua jalur pendidikan formal di tingkat sekolah menengah pertama atau atas, yaitu jalur sekolah menengah umum (SMP, SMA) dan jalur sekolah menengah kejuruan dan teknologi (ST, STM, SMEP, SMEA, SPG, SGO, SMKK dan seterusnya). Kedua jalur pendidikan formal ini tentu mempunyai tujuannya sendiri-sendiri. Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yang dinyatakan berlaku di seluruh wilayah tanah air Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 dalam penjelasannya menegaskan bahwa, sekolah menengah umum mementingkan pelajaran-pelajaran teori dan mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pelajarannya ke tingkat perguruan tinggi. Sedangkan sekolah menengah kejuruan (vak) mendidik tenaga-tenaga untuk bermacam-macam pekerjaan keahlian dan keterampilan, sehingga kemungkinan untuk melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi bagi para siswanya tertutup sama sekali.

Akibatnya, seperti dikatakan dalam penjelasan undang-undang ini, sebagian terbesar anak lulusan SD memilih masuk sekolah menengah umum dengan harapan dapat meneruskan pelajarannya ke perguruan tinggi. Minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah menengah kejuruan sangat kurang, sehingga masyarakat mengalami kekurangan tenaga kerja yang terampil. Oleh karena itu, ditegaskan kembali bahwa baik sekolah menengah umum maupun sekolah menengah kejuruan bertujuan mendidik tenaga-

tenaga ahli yang dapat menunaikan kewajibannya terhadap negara, dan dari kedua jalur pendidikan formal tingkat menengah ini dapat dipilih siswa-siswi yang lulus terbaik untuk mengikuti pelajaran-pelajaran di perguruan tinggi. Ketidaktegasan dalam menetapkan tujuan dari kedua jalur pendidikan formal tingkat sekolah menengah ini masih terasa hingga kini.

Hal ini terlihat dalam kebijaksanaan pemerintah dalam membina dan menata kehidupan sekolah menengah kejuruan dan teknologi. Pada tahun 1960-an pemerintah menyatakan maksudnya untuk menambah jumlah sekolah kejuruan dan teknologi. Dan pada waktu itu jumlah sekolah kejuruan dan teknologi meningkat dengan cepat dan beberapa sekolah menengah umum diubah menjadi sekolah menengah kejuruan. Namun penambahan jumlah sekolah kejuruan dan teknologi ini tidak diikuti dengan perubahan dan pembaharuan kurikulumnya,¹ pengadaan tenaga guru sekolah kejuruan dan teknologi, serta persiapan sarana dan fasilitas sekolah menengah kejuruan dan teknologi. Akibatnya sekolah-sekolah kejuruan dan teknologi menengah tersebut menghasilkan lulusan yang tidak berbeda dengan lulusan sekolah menengah umum setingkat.

Pada awal 1972 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan rencana usaha penggabungan SMA, STM, SMEA, dan SKKA menjadi satu jenis sekolah komprehensif, yang disebut Sekolah Menengah Pembangunan. Sekolah Menengah Pembangunan ini bertujuan tidak hanya untuk menghasilkan pekerja-pekerja pembangunan yang terlatih, tetapi juga untuk memberi efek transformasi ke arah masyarakat yang lebih rasional dan demokratis, melalui pengembangan dan penggunaan secara harmonis ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum dari sekolah menengah pembangunan ini sangat padat karena selain berisi pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan umum seperti terdapat dalam kurikulum SMA, juga memasukkan pelajaran keterampilan-keterampilan praktis seperti terdapat dalam kurikulum STM, SMEA, ataupun SKKA. Di tingkat sekolah menengah pertama, mulai tahun 1974 sekolah kejuruan dan teknologi diintegrasikan menjadi sekolah menengah umum (SMP). Dan sisanya akan dikembangkan menjadi sekolah keterampilan kejuruan, yang program pendidikannya diarahkan untuk memberikan keterampilan yang diperlukan di daerah pedesaan.

Selama ini sekolah menengah pembangunan tidak memperoleh pembinaan khusus, sehingga sekolah menengah pembangunan sudah disamakan dengan sekolah menengah umum biasa (SMA). Akibatnya lulusan dari semua sekolah itu mendapat perlakuan yang sama. Sementara itu kurikulum sekolah menengah kejuruan dan teknologi yang lain seperti STM, SMEA, SMKK, dan

¹C.E. Beeby, *Pendidikan di Indonesia, Penilaian dan Pedoman Perencanaan* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1981), hal. 227-255.

SPG serta SGO, telah diperbaharui pada tahun 1976 untuk mempertahankan identitasnya. Namun kita masih menunggu sikap pemerintah yang tegas dan jelas mengenai eksistensi sekolah menengah kejuruan dan teknologi ini. Apakah sekolah menengah kejuruan dan teknologi sebagai sub-sistem dari sistem pendidikan formal tingkat menengah ini akan bertahan seperti saat ini ataukah akan diintegrasikan ke dalam sekolah menengah umum? Keragu-raguan seperti ini antara lain menyebabkan para orang tua memilih sekolah menengah umum sebagai tempat belajar anak-anaknya dan bukan sekolah menengah kejuruan dan teknologi.

KURIKULUM

Kurikulum adalah bahan tertulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu institusi/sekolah yang harus dilaksanakan dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu sifat dan isi kurikulum harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari institusi/sekolah. Ini berarti bahwa sifat dan isi kurikulum sekolah menengah umum (SMP, SMA) harus berbeda dengan sifat dan isi dari sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah umum terutama bertugas untuk menyiapkan anak didik guna melanjutkan pelajarannya di perguruan tinggi, sedangkan sekolah menengah kejuruan menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai untuk kepentingan pembangunan. Tenaga kerja tersebut dibedakan atas: (1) tenaga kerja yang bekerja pada orang lain (pencari kerja); (2) tenaga kerja yang bekerja sendiri; dan (3) tenaga kerja yang memberi pekerjaan kepada orang lain (pencipta kerja).² Untuk menghasilkan jenis tenaga kerja yang diperlukan terlihat jelas dalam kurikulum dan silabus sekolah menengah kejuruan.

Dalam kurikulum pendidikan kejuruan dan teknologi tahun 1976, hirarki tujuan pendidikan kejuruan dijabarkan sebagai berikut: (1) tujuan umum pendidikan nasional; (2) tujuan institusional, yang harus dicapai seluruh program sekolah; (3) tujuan kurikuler yang harus dicapai oleh suatu program bidang studi; dan (4) tujuan instruksional yang harus dicapai oleh suatu program pengajaran dari suatu bidang studi.³ Kemudian tujuan instruksional ini dijabarkan lagi dalam sejumlah pokok bahasan dan sub-pokok bahasan yang disesuaikan dengan waktu bilamana pokok bahasan itu akan dijabarkan oleh guru. Berdasarkan itu, guru di sekolah kejuruan harus mampu menjalankan dan mengkomunikasikan program pengajaran ini untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

²A.S. Munandar, *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Rencana Pembangunan Nasional* (Jakarta: Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, 1981), hal. 10.

³Lihat buku *Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan Deparment Pendidikan & Teknologi* 1976.

Selain itu kurikulum sekolah menengah kejuruan tahun 1976/1977 membagi bidang studi atas: (1) program umum; dan (2) program kejuruan, yang terdiri atas dasar kejuruan, teori kejuruan, dan praktik kejuruan. Pembobotan waktu dibagi atas 20% untuk program umum dan 80% untuk program kejuruan. Dan dalam program kejuruan, alokasi waktu dibagi lagi atas 50% untuk dasar dan teori kejuruan serta 50% untuk praktik kejuruan. Dengan pembobotan waktu seperti ini sebenarnya kurikulum sekolah menengah kejuruan tahun 1976/1977 ini dapat dinilai baik.

Masalahnya adalah apakah isi kurikulum ini sudah dilaksanakan secara baik dan tepat? Pertanyaan ini timbul mengingat kenyataan bahwa sekolah-sekolah menengah kejuruan sering mengalami kekurangan tenaga guru bidang studi dan ketiadaan sarana dan fasilitas yang menunjang pengajaran praktik. Lagipula masih ada keluhan bahwa silabus yang disusun oleh para guru di masing-masing sekolah sejenis dan setingkat belum seragam, karena tidak tersedianya tenaga guru, dan sarana serta fasilitas di sekolah-sekolah itu.

Kelemahan lain adalah proses mengajar guru di dalam kelas lebih menekankan bidang kognitif daripada bidang afektif. Anak didik lebih bersikap pasif dalam menerima dan mencerna pengetahuan. Guru belum mampu mendorong anak didik untuk aktif mengajukan pertanyaan, menganalisa, meng-evaluasi dan mengajukan alternatif pemecahannya. Proses belajar-mengajar siswa aktif ini penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa mandiri sebagai salah satu modal bagi anak didik untuk memasuki lingkungan pekerjaan.

GURU BIDANG STUDI

Dewasa ini hampir semua jenis dan tingkat sekolah kejuruan dan teknologi mengalami kekurangan tenaga guru. Tenaga guru di sekolah-sekolah ini selain memiliki pengetahuan teoretis untuk bidang studinya juga harus memiliki keterampilan untuk menerapkan pengetahuan itu di bengkel-bengkel kerja atau di laboratorium. Ia juga harus mampu mendorong semangat anak didik untuk menyenangi bidang kejuruan itu dan menanamkan rasa tanggung jawab serta disiplin bekerja. Dengan kata lain, ia bukan hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi sebagai pendidik, pembimbing, dan pemberi teladan dalam semangat dan disiplin.

Untuk mengatasi kekurangan guru ini, pemerintah dalam Pelita IV merencanakan untuk menambah sebanyak 42.900 guru SMTA Kejuruan dan Teknologi. Dan untuk meningkatkan mutu guru dalam bidang studinya, di-

rencanakan untuk menatar 16.000 guru dan kepala SMTA Kejuruan dan Teknologi termasuk 2.500 guru SMTA swasta. Sementara itu untuk SMTP Kejuruan dan Teknologi akan ditatar 2.800 guru.⁴

Selain sebagai pelaksana isi kurikulum sesuai dengan bidang studi yang dimilikinya, guru bertugas sebagai pengembang isi kurikulum. Pada permulaan tahun ajaran baru setiap guru merencanakan urutan pokok bahasan materi pelajaran untuk setiap semester ataupun sepanjang tahun ajaran itu. Agar dapat melaksanakan tugas ini secara baik, guru harus mengetahui secara tepat informasi tentang perkembangan bidang studinya, dalam arti perkembangan ilmunya maupun penerapannya dalam kehidupan nyata di masyarakat. Hal ini penting agar materi pelajaran yang diajarkan di sekolah selalu relevan dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, para siswa benar-benar disiapkan untuk memasuki lapangan kerja.

Di samping itu lingkungan sekolah sebagai wadah proses belajar-mengajar perlu memiliki sarana dan fasilitas yang menunjang pelaksanaan tugas guru. Di setiap sekolah menengah kejuruan dan teknologi ini perlu disediakan bengkel kerja, laboratorium, dan perpustakaan. Dengan demikian para guru dapat melaksanakan tugas secara baik. Sistem administrasi dan manajemen perlu juga ditata secara baik di setiap sekolah. Kekurangan guru di sekolah menengah kejuruan dan teknologi bukan hanya dalam arti jumlah tetapi juga dalam arti *mutu*. Sebaliknya beberapa jenis sekolah kejuruan dan teknologi seperti STM mengalami kelebihan tenaga guru, karena menerima guru yang tidak sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan di sekolah itu akibat penempatan dari atas.

Menghadapi masalah tersebut perlu diambil langkah-langkah penanggulangannya secara simultan. Langkah-langkah tersebut bukan hanya berbentuk penataran guru bidang studi seperti yang dilaksanakan saat ini, tetapi juga penataan kembali sekolah-sekolah pendidikan guru, seperti SPG, SGO, IKIP, dan FKIP di universitas-universitas. Penataan ini tidak hanya berupa peninjauan kembali kurikulum sekolah pendidikan guru, tetapi penyediaan sarana dan fasilitas pendidikan yang lengkap termasuk tenaga dosen yang bermutu di setiap sekolah pendidikan guru itu, sehingga dapat menghasilkan tenaga guru yang bermutu pula. Di samping itu pemerintah perlu meningkatkan minat terhadap profesi guru. Dewasa ini ada kesan bahwa seseorang terpaksa menjadi guru (termasuk tamatan dari sekolah guru), karena tidak diterima di tempat kerja lain di luar profesi guru ini.

⁴ Lihat buku *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat, 1984/1985 - 1988/1989*, Jilid II, hal. 549-560.

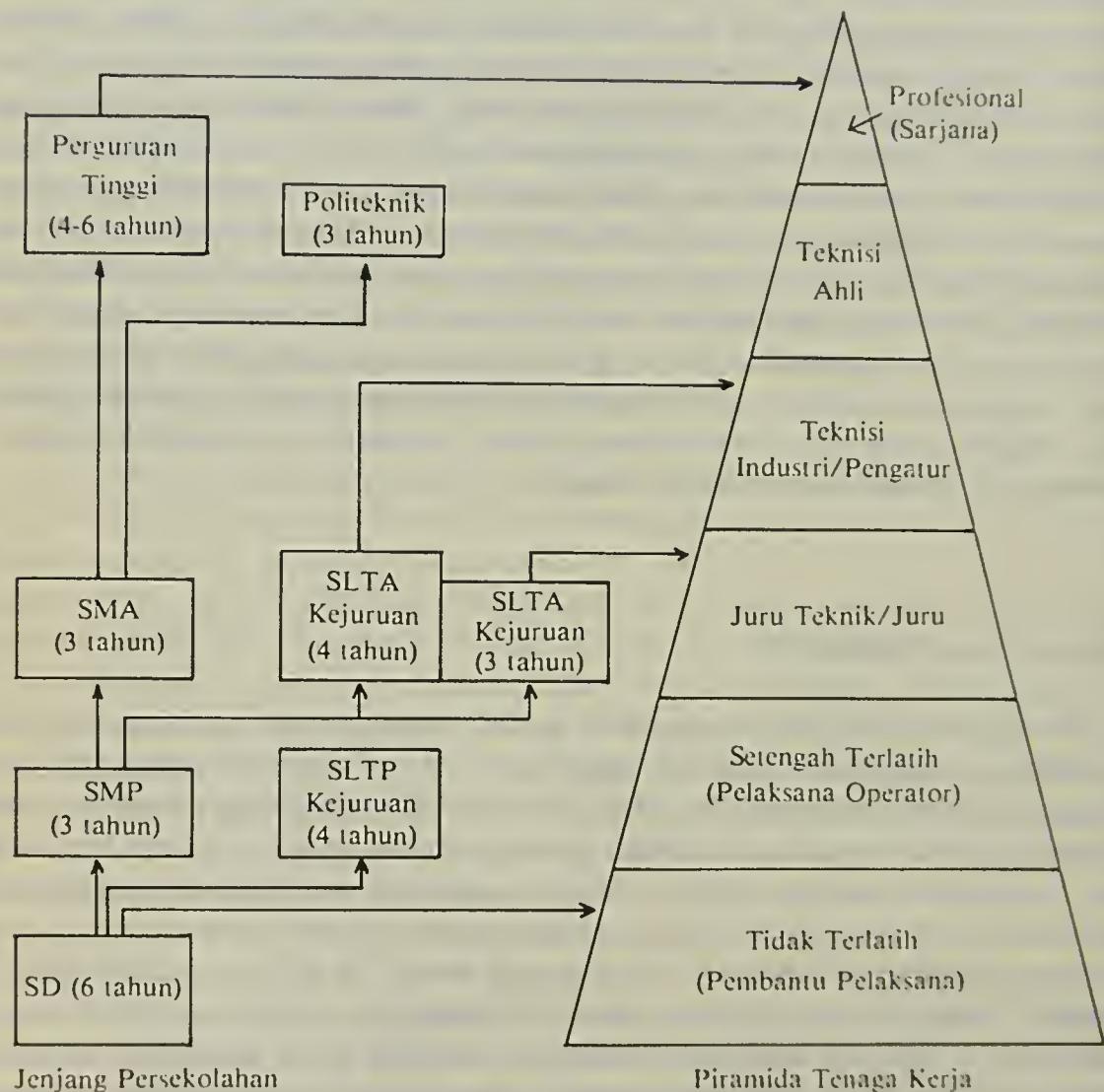
Untuk meningkatkan minat terhadap profesi guru tersebut, masalah penggajian guru perlu diberi perhatian khusus. Banyak guru sekolah kejuruan mengeluh bahwa tenaga dan waktu mereka terlalu banyak dipergunakan untuk kepentingan anak didik, dibandingkan dengan pegawai negeri lain. Padahal status dan pendapatan mereka sebagai sesama pegawai negeri adalah sama. Oleh karena itu banyak guru kurang bersemangat dalam melakukan tugas sebagai pengajar dan pendidik yang baik. Harus diakui bahwa tanggung jawab guru sebagai pembentuk generasi muda untuk masa depan bangsa sangat berat. Oleh karena itu sudah sepantasnya guru mendapat perhatian yang besar. Dewasa ini pemerintah berusaha membina administrasi kependidikan yang baik, seperti pemberian gaji guru tepat pada waktunya, kenaikan pangkat guru yang tepat waktu, dan bila perlu waktu kenaikan pangkat itu lebih cepat dari pegawai negeri yang lain. Usaha-usaha ini perlu diwujudkan dan bukan hanya berbentuk himbauan dan omongan belaka. Hal ini berkaitan erat dengan usaha untuk merangsang minat masyarakat memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah kejuruan.

MINAT MASYARAKAT

Secara umum minat masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah kejuruan dan teknologi tidak besar. Mungkin pihak orang tua beranggapan bahwa memasukkan anaknya ke sekolah menengah kejuruan dan teknologi sama dengan menyiapkan anaknya untuk menjadi tenaga kerja kasar. Sedangkan apabila anaknya dapat menempuh jalur pendidikan formal melalui sekolah menengah umum, peluang untuk menjadi tenaga kerja di kantor pemerintahan (white collar job) sangat besar. Di kalangan anak remaja sendiri, keinginan untuk masuk sekolah menengah umum juga lebih besar daripada ke sekolah menengah kejuruan. Melalui jalur sekolah menengah umum, mereka dapat melanjutkan pelajarannya ke perguruan tinggi, sedangkan melalui sekolah menengah kejuruan kesempatan langsung untuk itu tidak ada. Sekolah menengah kejuruan dan teknologi menyiapkan anak didik untuk masuk ke lapangan kerja.

Usaha untuk menumbuhkan minat masyarakat memasukkan anak-anaknya ke sekolah menengah kejuruan dan teknologi dapat dilakukan dengan: (1) meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan dan teknologi agar para lulusannya benar-benar siap pakai di lingkungan pekerjaan; (2) menyesuaikan jumlah keluaran sekolah menengah kejuruan dan teknologi dengan daya serap lapangan kerja yang ada; dan (3) mengatur sistem penggajian berdasarkan kreativitas dan prestasi kerja dan bukan hanya pada ijazah. Point satu dan dua ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan struktur jenjang persekolahan

bersama piramida tenaga kerja yang dipakai oleh banyak negara sebagai berikut:⁵



Bagan ini menunjukkan bahwa sekolah menengah umum (SMP, SMA) maupun sekolah menengah kejuruan dan teknologi menyiapkan anak didik untuk masuk ke lapangan kerja. Bagi lulusan sekolah menengah umum tetap terbuka peluang untuk langsung melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Faktor ini mendorong masyarakat untuk lebih dahulu memilih sekolah menengah umum menjadi jahir pendidikan formal bagi anak-anaknya. Apalagi dalam kurikulum sekolah menengah umum tahun 1984 yang menerapkan sistem se-

⁵Hadiwaratama, "Pendidikan Kejuruan untuk Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi Nasional," *Analisis Pendidikan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun I, No. 2, 1980, hal. 64.

mester, anak didik mulai dari semester tiga memilih paket pelajaran A atau B. Mereka yang memilih paket B secara sadar menyiapkan diri untuk masuk ke lapangan kerja. Dan jalur pendidikan formal tinggi yang dapat ditempuhnya adalah politeknik. Oleh karena itu bagi siswa yang mengambil program pelajaran paket B pembinaan keterampilan dan sikap khusus yang sesuai dengan sifat spesialisasi kejuruan akan sama dengan siswa tamatan sekolah kejuruan dan teknologi.

Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga masyarakat dapat secara tepat memilih jalur pendidikan formal tingkat menengah bagi anak-anaknya. Apabila pemerintah masih berikhtiar untuk mengembangkan sekolah kejuruan dan teknologi, maka hal itu perlu terwujud dalam kebijaksanaan yang pasti tentang tujuan sekolah kejuruan yang berbeda dengan tujuan sekolah menengah umum.

Apabila masyarakat telah mengetahui tujuan sekolah menengah kejuruan dan teknologi secara tepat, maka minat mereka untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah ini dapat dirangsang, misalnya dengan memberikan beasiswa bagi sekolah-sekolah menengah kejuruan dan teknologi tertentu, seperti SPG dan SGO. Hal ini mengingat kebutuhan tenaga guru setiap tahunnya akan terus meningkat di satu pihak, sedangkan di pihak lain minat para orang tua untuk memasukkan anak-anaknya ke SPG atau sekolah pendidikan guru pada umumnya sangat kecil. Selain itu, Departemen Tenaga Kerja sebagai instansi pemerintah yang berwenang menyalurkan tenaga kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan/membutuhkannya perlu memberi peluang yang lebih besar kepada pencari kerja yang memiliki ijazah sekolah menengah kejuruan dan teknologi. Tentu hal ini perlu disesuaikan dengan persyaratan dari pihak pemakai tenaga kerja.

BIAYA

Biaya untuk mendirikan sebuah sekolah menengah kejuruan dan teknologi adalah lebih besar daripada biaya untuk mendirikan sebuah sekolah menengah umum. Sebuah sekolah menengah kejuruan dan teknologi membutuhkan laboratorium, bengkel kerja, mesin-mesin dan peralatan untuk karya praktik, dan perpustakaan.

Apabila semua ini tersedia dan dilengkapi lagi dengan tenaga guru bidañ studi yang bermutu dan memiliki semangat mengabdi pada profesinya, maka para lulusan dari sekolah ini pasti bermutu pula. Dewasa ini masyarakat pemakai tenaga kerja sering mengeluh bahwa banyak lulusan sekolah menengah

kejuruan dan teknologi tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk memenuhi tuntutan jenis pekerjaan yang ada. Timbul ungkapan-ungkapan sinis dalam masyarakat terhadap sekolah menengah kejuruan dan teknologi, seperti "STM Sastra" dan lain sebagainya.

Biaya yang besar ini tidak hanya digunakan untuk mendirikan gedung dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan, tetapi juga untuk memelihara dan memperbaiki peralatan yang rusak. Banyak peralatan praktik di sekolah menengah kejuruan dan teknologi tidak dapat dipakai karena rusak, dan bahkan sering menjadi "besi tua" karena tidak diperbaiki. Akibatnya jam pelajaran praktik diisi dengan kegiatan melihat dan meraba-raba peralatan yang rusak itu, jika tidak dengan pelajaran teori.

Keadaan seperti ini tidak jarang disebabkan oleh tidak tersedia dana yang memadai. Oleh karena itu sebagai pengelola dan penanggung jawab terhadap sekolah-sekolah negeri menengah kejuruan dan teknologi pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu menggunakan dana yang terbatas secara efektif, efisien dan tepat guna. Dewasa ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Departemen Agama merencanakan untuk membangun rumah/tempat ibadah di setiap sekolah negeri. Apakah hal ini merupakan suatu kebutuhan yang mendesak? Apakah tidak lebih bijaksana dana untuk kepentingan itu digunakan untuk mengadakan atau memperbaiki peralatan praktik, sarana dan fasilitas pendidikan di sekolah-sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan dan teknologi?

Untuk mengatasi kekurangan dana, pemerintah dapat juga mendorong pihak swasta yang mampu dan mau memberikan bantuan (donatur) ataupun mendirikan sekolah kejuruan dan teknologi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kelompok-kelompok industri, pengusaha-pengusaha sebagai pemakai tenaga lulusan sekolah menengah kejuruan dan teknologi perlu didorong untuk menjadi donatur atau menyediakan di lingkungan usahanya peralatan-peralatan yang dapat dipakai oleh para siswa untuk praktik.

Memang sudah waktunya pimpinan sekolah menengah kejuruan mengadakan hubungan/kerjasama dengan kelompok industri, pengusaha, BUMN. Secara demikian sebagai penghasil tenaga kerja sekolah dapat mengetahui secara langsung jenis tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Di samping itu dunia usaha perlu melaksanakan "in service training" bagi tenaga kerja yang baru diterimanya. Departemen Tenaga Kerja secara teratur melalui timatau SMTA umum atau kejuruan dan teknologi di Balai Latihan Keterampilan. Rupanya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu menjalin hubungan kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja untuk memuskan pembinaan sekolah menengah kejuruan dan teknologi ini.

PENUTUP

Pengembangan sekolah menengah kejuruan dan teknologi sebagai subsistem dari sistem pendidikan nasional dalam Pelita IV ini diarahkan pada usaha penyesuaian berbagai macam kesempatan kerja di sektor-sektor yang memerlukan keahlian/keterampilan dengan peningkatan mutu dan intensitas keterampilan tenaga kerja tingkat menengah. Ini berarti bahwa lingkungan sekolah menengah kejuruan dan teknologi sebagai wadah yang menghasilkan tenaga kerja jenis ini perlu ditata secara mendasar. Penataan ini dapat dimulai dengan mengadakan gedung/ruang kelas, laboratorium, bengkel-bengkel kerja, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan, kurikulum dan silabus, sehingga jelas perbedaannya dengan sekolah menengah umum, terutama dalam hal tujuan dan orientasinya, dan pembinaan guru bidang studi yang bermutu. Semua ini membutuhkan jumlah dana yang besar. Oleh karena itu sebagai penanggung jawab utama pembinaan dan pengembangan sekolah menengah kejuruan dan teknologi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan perlu menggunakan dana yang terbatas itu untuk keperluan yang mendesak, seperti membina sekolah kejuruan dan teknologi ini.

Universitas Terbuka dan Tantangan Belajar Mandiri

Iwan P. HUTAJULU*

PENDAHULUAN

Universitas Terbuka yang diresmikan Presiden Soeharto pada 4 September 1984 akan memasuki tahun kedua pada tahun ajaran 1985/1986 ini. Namun dari pengalaman pada tahun pertama Universitas Terbuka telah diketahui bahwa kemandirian mahasiswa dalam belajar masih merupakan masalah. Belajar mandiri belum merupakan kebiasaan bagi lulusan SMTA pada umumnya. Oleh karena itu, penyesuaian diri dengan cara belajar mandiri dalam Universitas Terbuka itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Bila mahasiswa ingin berhasil belajar di Universitas Terbuka, maka tantangan belajar mandiri itu harus bisa diatasi.

Universitas Terbuka adalah pendidikan tinggi dengan sistem belajar jarak jauh. "Terbuka" berarti bahwa universitas ini memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki ijazah SMTA untuk menjadi calon mahasiswanya, dan selanjutnya setiap mahasiswa yang diterima bebas menentukan program studi, irama studi, dan waktu serta tempat studinya. Dengan dilenggarakannya Universitas Terbuka, maka terbukalah kesempatan bagi masyarakat untuk memanfaatkan pendidikan tinggi tanpa perlu banyak meninggalkan tempat kediaman atau tempat pekerjaan. Hal ini sangat membantu mengingat wilayah kepulauan Indonesia yang sangat luas. Di samping diperluasnya kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi lulusan SMTA, para pegawai negeri, termasuk guru-guru yang bertugas di tempat terpencil, dan pegawai swasta dapat meningkatkan kemampuan dan menambah pengetahuan serta keterampilan tertentu.

*Staf CSIS.

MAHASISWA UNIVERSITAS TERBUKA

Dalam penerimaan mahasiswa Universitas Terbuka pada tahun pertama, jumlah calon mahasiswa Universitas Terbuka adalah sebesar 55 ribu orang yang dipilih dari 268 ribu lebih peminat. Para peminat itu terdiri dari 201 ribu peserta Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) dan 67 ribu lebih pelamar lewat pos. Dalam tahun ajaran 1985/1986 Universitas Terbuka akan menerima mahasiswa baru sekitar 30 ribu orang. Mahasiswa program Akta tahun lalu dan program diploma tahun ini sudah selesai. Ada pula mahasiswa yang tak mendaftar kembali pada semester berikutnya. Jadi mahasiswa lama diperkirakan tinggal sekitar 40 ribu orang.¹ Bila tahun ini direncanakan jumlah mahasiswa lama dan baru sebanyak 70 ribu orang, maka tahun ini Universitas Terbuka dapat menerima sekitar 30 ribu orang.

Menurut Prof.Dr. Setijadi, Universitas Terbuka akan dijadikan pilihan pertama dan kedua bagi calon mahasiswa yang melamar melalui Sipenmaru dalam tahun ajaran baru 1985/1986. Pada tahun lalu Universitas Terbuka dimasukkan dalam pilihan ketiga, sehingga sekitar 201 ribu calon mahasiswa menjatuhkan pilihannya pada Universitas Terbuka. Ternyata ketika dipanggil banyak calon tidak datang, sehingga panggilan kembali dialihkan kepada mereka yang melamar lewat kantor pos.² Dengan ditetapkannya Universitas Terbuka sebagai pilihan pertama dan kedua bagi calon mahasiswa yang melamar melalui Sipenmaru, dapat diharapkan calon mahasiswa yang diterima lebih bermotivasi daripada sekedar coba-coba saja.

Tampaknya jumlah mahasiswa yang dapat diterima di Universitas Terbuka dibatasi. Seluruh mahasiswa yang akan diterima berjumlah sekitar 70 ribu itu sudah termasuk program diploma, program sarjana non-kependidikan, dan Akta V dari mahasiswa lama dan baru. Menurut Setijadi, hal ini disebabkan oleh dana yang diterima Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cukup kecil. Sehingga dana untuk Universitas Terbuka pun menjadi kecil.³ Di lain pihak, dengan jumlah mahasiswa yang terbatas itu Universitas Terbuka dapat menata diri menjadi lebih baik lagi.

Pada tahun pertama Universitas Terbuka dibuka, diperkirakan banyak lulusan SMTA tahun ajaran 1983/1984 yang akan memasuki Universitas Terbuka. Namun ternyata sebagian besar jumlah mahasiswa Universitas Terbuka adalah mereka yang sudah bekerja dengan ijazah tahun-tahun sebelum tahun ajaran 1983/1984. Perbandingan jumlah mahasiswa Universitas Terbuka yang berasal dari mereka yang sudah bekerja dengan mereka yang baru lulus SMTA

¹Lihat *Suara Karya*, 3 April 1985.

²Lihat *Suara Karya*, 12 Maret 1985.

³Lihat *Kompas*, 14 Maret 1985.

adalah delapan berbanding satu.⁴ Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa belum ada pemahaman dan pengakuan akan eksistensi Universitas Terbuka di kalangan lulusan SMTA, lagi pula Universitas Terbuka sendiri merupakan sistem pendidikan yang masih baru.

Universitas Terbuka menyelenggarakan tiga jenis program studi, yaitu program sarjana (S.1), program diploma (D.1, D.2) dan program Akta V. Program akta dan diploma adalah program peningkatan mutu guru di sekolah menengah dan tenaga pengajar di perguruan tinggi. Bidang-bidang studi bagi para mahasiswa yang mengikuti program S.1 terdiri atas administrasi negara, administrasi niaga, ekonomi dan studi pembangunan, dan statistika terapan. Menurut Setijadi, dari 70 ribu mahasiswa yang merupakan kumpulan mahasiswa lama dan baru, sebanyak 53 ribu sampai 55 ribu program S.1, sisanya untuk program diploma. Program Akta V yang tahun lalu diikuti 5 ribu orang, tahun ini menurun dan hanya diikuti 2 ribu orang.⁵

Dalam tahun kuliah 1985/1986 ini, program studi baru diawarkan hanya untuk guru. Program kependidikan S.1 menawarkan program studi pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan kimia, pendidikan bahasa Inggris. Program ini diperuntukkan bagi guru yang memiliki ijazah D.3, PGSLA, B.1, Sarjana Muda dan yang sederajat. Semenara itu program studi baru untuk masyarakat umum tidak akan ditawarkan pada tahun ini. Menurui Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof.Dr. Sukadji Ranuwihardjo, hal ini oleh karena membuka program baru merupakan usaha yang tidak mudah.⁶

PROSES BELAJAR

Proses belajar yang diterapkan oleh Universitas Terbuka pada dasarnya ditujukan pada penyiapan mahasiswa untuk belajar mandiri. Yang dimaksud dengan belajar mandiri ialah mahasiswa bebas menentukan program belajar, gaya belajar dan waktu serta tempat belajar bagi dirinya sendiri. Adapun yang dimaksud dengan belajar ialah segenap rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau kemahiran yang sisatnya sedikit banyak permanen.⁷

⁴Lihat *Antara*, 9 Oktober 1985.

⁵Lihat *Kompas*, 14 Maret 1985.

⁶*Ibid.*

⁷The Liang Gie, *Cara Belajar yang Efisien* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hal. 6.

Apabila proses belajar mengajar di Universitas Terbuka dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, maka diperlukan *motivasi* dan *keuletan* belajar yang tinggi dari para mahasiswa. Ia harus mempelajari sendiri sejumlah paket modul belajar. Belajar mandiri merupakan kegiatan utama bagi mahasiswa Universitas Terbuka; sedangkan kegiatan belajar kelompok antar mahasiswa merupakan kegiatan belajar tambahan; demikian pula kegiatan belajar tatap muka antara mahasiswa dan pembimbing atau tutor hanyalah merupakan bantuan bagi yang membutuhkan. Untuk keperluan praktik digunakan sarana praktik di perguruan tinggi terdekat atau sarana praktik lain yang memadai.

Kegiatan belajar lainnya adalah program yang dirancang melalui media elektronika seperti kaset, televisi maupun radio. Kuliah umum melalui TVRI diselenggarakan dalam waktu 20 menit untuk satu kali siaran dengan tenggang waktu dua minggu setiap hari Kamis. Secara teratur mahasiswa Universitas Terbuka akan belajar melalui TVRI dan RRI yang pada tahun pertama jam siarannya masih sangat terbatas. Namun secara bertahap akan ditingkatkan.

Secara terperinci, sistem belajar terbuka ini meliputi kegiatan-kegiatan belajar sebagai berikut:⁸

1. mempelajari bahan tertulis (modul dan bahan tercetak lainnya) yang telah diprogramkan;
2. interaksi tatap muka, dengan tutor baik langsung maupun tak langsung melalui komunikasi satelit;
3. interaksi antar individu dalam kelompok belajar;
4. mendengarkan dan menyaksikan program audio visual (kaset audio, dan lain-lain);
5. praktikum di laboratorium dan kerja lapangan;
6. mengerjakan test unit modul yang diselenggarakan oleh pembimbing (tutor);
7. mengerjakan ujian semester;
8. menulis tesis dan ujian tesis bagi mahasiswa yang mengambil program utama.

Karena sistem belajar terbuka ini masih berada dalam tahap pengembangan, Universitas Terbuka menyediakan pelayanan bimbingan belajar tatap muka secara terjadwal dengan waktu terbatas. Tutorial yang telah dilakukan sampai saat ini adalah dua bulan sekali pada hari Minggu (dari jam 8.00 sam-

⁸Ibrahim Musa, *Panduan Studi Mahasiswa Universitas Terbuka* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hal. 1-2.

pai jam 15.00). Jadi selama satu semester diadakan tiga kali pertemuan tatap muka dengan para tutor. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kegagalan belajar akibat kurangnya inisiatif mahasiswa untuk berkonsultasi dengan tutor. Tempat pertemuan itu diatur menurut program studinya.

MASALAH TUTORIAL

Tutorial adalah pelayanan bimbingan belajar tatap muka oleh tutor dengan mahasiswa. Tutor itu adalah orang yang dekat hubungannya dengan mahasiswa melalui mata kuliah yang menjadi tanggung jawabnya, terlibat dalam dialog tatap muka ataupun tulisan (surat), makalah mahasiswa yang diperiksanya, dan diskusi melalui telepon.⁹

Semula pihak penyelenggara Universitas Terbuka mengharapkan tutorial hanya merupakan acara penunjang guna melayani pertanyaan-pertanyaan mahasiswa tentang materi modul yang dianggap benar-benar sulit. Dengan demikian tutorial tidak dimaksudkan sebagai kuliah antara dosen dan mahasiswa. Namun pada tatap muka (tutorial) pertama antara mahasiswa Universitas Terbuka dan pembimbing studinya (tutor), tidak banyak mahasiswa bertanya mengenai bahan kuliah, sedangkan tutorial diadakan justeru sesudah menerima serangkaian berkas bahan kuliah (modul). Banyak mahasiswa tidak mempelajari modul lebih dahulu. Bahkan tidak sedikit mahasiswa mengira bahwa tutorial itu merupakan kuliah pertama.¹⁰

Gejala itu menunjukkan bahwa model pengajaran yang berlangsung sampai sekarang adalah model yang lebih menekankan pemindahan pengetahuan dari pengajar kepada anak didik. Anak didik lebih bersikap pasif dalam arti menerima saja apa yang diberikan oleh pengajar. Di universitas biasanya gejala serupa itu masih berlangsung. Mahasiswa dan pengajar lebih banyak menggantungkan diri pada kuliah dalam bentuk ceramah. Akibatnya, mahasiswa dibiasakan untuk menggantungkan diri pada pengajarnya. Untuk menciptakan kemampuan belajar mandiri, diperlukan waktu untuk menyesuaikan sikap mental mahasiswa dengan cara belajar mandiri tersebut. Perubahan kepada cara belajar mandiri pada dasarnya merupakan pengalihan pemusatan wewenang belajar dari guru kepada anak didik. Perubahan sikap belajar mandiri juga tidak akan dengan sendirinya terwujud bila tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti tutorial.

⁹Drs. A. Suryadi, MA, *Universitas Terbuka, Apa, Mencapa, Baikapana* (Bandung: Penerbit Alumni, 1984), hal. 41.

¹⁰Lihat *Suara Karya*, 6 November 1984.

Hal ini ditunjukkan dari sebagian besar (80%) mahasiswa Universitas Terbuka yang mendatangi tutorial.¹¹ Kebutuhan untuk mendapatkan bimbingan dari tutor sangat besar, namun jumlah tutor yang tersedia tidak mengimbangi banyaknya mahasiswa. Saat ini perbandingan tutor dengan mahasiswa adalah satu berbanding seratus dua puluh.¹² Akibatnya, para tutor tidak bisa membantu mahasiswa untuk belajar secara lebih mendalam dan individual. Waktu tutorial yang dilakukan setiap dua bulan sekali juga dirasakan kurang memadai oleh mahasiswa Universitas Terbuka.

Hingga kini mahasiswa Universitas Terbuka masih sulit mendapatkan bantuan bila menghadapi berbagai masalah mata kuliah Universitas Terbuka. Beberapa modul sulit dicerna bagi pemula, sehingga perlu disederhanakan lagi agar mahasiswa bisa belajar mandiri. Tutor pun tidak bisa berbuat banyak, mengingat jumlah mereka yang sedikit. Menurut Kepala Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Bandung, Dr. Mohammad Surya, idealnya mahasiswa Universitas Terbuka itu harus belajar mandiri; tetapi karena masih adanya kekurangan-kekurangan pada modul, kehadiran tutor dan pusat bimbingan itu masih diperlukan.¹³ Keadaan ini antara lain telah mendorong tumbuhnya lembaga Tutorial Swasta di beberapa kota seperti Jakarta dan Yogyakarta. Lembaga ini menawarkan kepada mahasiswa Universitas Terbuka kesempatan memperoleh tutorial dalam frekuensi yang lebih banyak.¹⁴ Dengan kehadiran lembaga tutorial swasta ini, angka tingkat putus kuliah (drop out) yang disebabkan kekurangmampuan belajar mandiri di kalangan mahasiswa Universitas Terbuka dapat berkurang.

Tujuan dari diselenggarakannya tutorial oleh pihak swasta adalah membantu mahasiswa yang merasa tidak mampu belajar mandiri, sambil juga mencari uang. Mengingat kelangsungan hidup lembaga tutorial swasta ini justru dari ketidakmampuan mahasiswa Universitas Terbuka untuk belajar mandiri, maka dari lembaga ini sulit diharapkan melatih pesertanya belajar mandiri. Kerugian yang akan dialami oleh mahasiswa yang mengikuti tutorial swasta ini ialah sikap mental mereka akan tetap tergantung pada lembaga ini. Di pihak lain, kemandirian mahasiswa Universitas Terbuka harus dilatih, agar kelak mereka mampu belajar tanpa bantuan siapa pun. Untuk itu perlu dipikirkan agar tutorial yang diselenggarakan pihak Universitas Terbuka sendiri dapat merupakan sarana untuk melatih mahasiswa memahami cara belajar mandiri.

¹¹Lihat *Merdeka*, 28 Desember 1984.

¹²Lihat *Sinar Harapan*, 15 Januari 1985.

¹³*Ibid.*

¹⁴Lihat *Tempo*, 27 April 1985, hal. 26.

Tutorial yang dilakukan pihak Universitas Terbuka diharapkan akan mendorong mahasiswa agar semakin mampu belajar sendiri. Oleh karena itu penyelenggaraan tutorial oleh pihak Universitas Terbuka perlu lebih disempurnakan agar mahasiswa mendapat pelayanan belajar secara lebih mendalam dan individual. Perbandingan antara tutor dengan mahasiswa sebaiknya diperkecil, dengan menambah tutor. Di samping itu, perlu didirikan pusat bimbingan mahasiswa di setiap cabang Universitas Terbuka. Dengan demikian mahasiswa tidak perlu belajar di lembaga tutorial swasta.

Dalam rangka penambahan jumlah tutor, sebaiknya para calon tutor dilatih terlebih dahulu agar mampu memainkan peranan secara tepat. Seorang tutor seharusnya bertindak sebagai fasilitator kegiatan mahasiswa dan promotor diskusi kelompok. Seorang tutor pun tidak perlu menuruti keinginan mahasiswa yang memaksanya bertindak sebagai dosen. Hal ini memang mudah dikatakan tetapi sulit dilakukan. Masalahnya adalah bagaimana mengubah gaya mengajar yang menuntut kesadaran dan disiplin yang tinggi dari para calon tutor.

Bila jumlah tutor telah ditambah, maka tutor dapat lebih memperhatikan peranannya sebagai berikut:

1. membantu mahasiswa memahami bahan kuliah (modul) melalui diskusi;
2. menjawab pertanyaan mahasiswa yang menghadapi berbagai masalah yang menyangkut pada mata kuliah Universitas Terbuka;
3. menyelenggarakan diskusi tatap muka atau melalui telepon;
4. melakukan supervisi terhadap kerja praktik atau proyek mahasiswa;
5. membantu mahasiswa menyusun rencana belajarnya; dan
6. mendorong terbentuknya kelompok belajar.

Dua peranan yang disebut terakhir ini dapat mendorong sikap kemandirian mahasiswa dalam belajar.

Meskipun penyelenggaraan tutorial telah ditingkatkan dengan menambah jumlah tutor yang telah terlatih, perubahan sikap belajar mandiri tetap harus berasal dari dalam diri mahasiswa sendiri. Oleh karena itu mahasiswa Universitas Terbuka perlu disadarkan bahwa belajar mandiri merupakan kegiatan utama mereka, sedangkan kegiatan belajar kelompok antar mahasiswa dan tutorial hanya merupakan pelengkap bagi yang membutuhkan.

Sehubungan dengan itu, perlu disediakan buku petunjuk mengenai cara belajar mandiri dalam sistem belajar jarak jauh, sebelum kegiatan kuliah dimulai; seperti yang dilakukan oleh *Universidad Estatal a Distancia* (UNED) di Costa Rica misalnya menerbitkan paket "Belajar Bagaimana Belajar," dan

United Kingdom Open University menyelenggarakan bimbingan khusus ditambah dengan paket "Keterampilan Belajar Mandiri."¹⁵ Di samping menerbitkan paket buku "Belajar Bagaimana Belajar Mandiri," Universitas Terbuka di Indonesia juga perlu menyelenggarakan tutorial khusus untuk menjelaskan metoda belajar mandiri pada awal kuliah.

Percobaan-percobaan yang dilakukan membuktikan bahwa sekelompok mahasiswa yang diberi petunjuk-petunjuk tentang cara belajar yang baik dapat mengikuti pelajaran dengan lebih sempurna. Mereka dapat mencapai hasil yang lebih memuaskan daripada kelompok mahasiswa lain yang tidak menerima pengetahuan itu. Dan ternyata dengan mengikuti penjelasan metoda belajar mandiri, kelompok mahasiswa itu lalu memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi pelajaran-pelajaran di perguruan tinggi dan mengetahui persyaratan tugas yang harus dipenuhi. Mereka mengerti pula berbagai macam kesulitan yang akan dihadapi dan cara-cara yang tepat untuk mengatasinya.¹⁶

TANTANGAN BELAJAR MANDIRI

Ketidakmampuan para mahasiswa Universitas Terbuka untuk belajar mandiri itu, bila ditelaah lebih lanjut, disebabkan oleh kebiasaan cara belajar mereka di SMTA. Para dosen yang ditanyai dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Padjadjaran dalam tahun 1959-1960 mengemukakan kelemahan-kelemahan yang berikut:

1. kurang cara berpikir kritis, inisiatif dan ketelitian;
2. tekanan pada hafalan di luar kepala, berpegang pada buku saja dan secara pasif menerima bahan pelajaran;
3. kurang kesadaran mengenai minat dan bakat;
4. kurang minat membaca buku yang dapat memperluas pengetahuan;
5. kurang belajar berkelompok dan mendiskusikan bahan pelajaran;
6. belajar untuk mengejar angka, ijazah dan untuk ujian.

Meskipun penelitian itu dilakukan 25 tahun yang lalu, tampaknya dari para lulusan SMTA saat ini, dapat diketahui bahwa model pengajaran yang berlangsung sampai sekarang lebih menekankan pemindahan pengetahuan dari pengajar kepada anak didik. Atau dengan kata lain, perilaku guru dalam mengajar tidak berubah dalam 25 tahun terakhir ini. Menurut Waskito, se-

¹⁵Drs. A. Suryadi, MA, *op. cit.*, hal. 20-21.

¹⁶The Liang Gie, *op. cit.*, hal. 14.

seorang akan mempertahankan tingkah lakunya, apabila ia tahu bahwa tingkah lakunya itu adalah yang dihargai atau diharapkan oleh lingkungannya. Untuk tingkah lakunya yang demikian ia memperoleh penghargaan, baik dalam bentuk statusnya maupun dalam bentuk insentifnya. Jika ia senang dengan penghargaan itu maka ia akan mengulang tingkah lakunya lagi, dan lama-lama tingkah lakunya itu akan menjadi pola perilakunya. Dengan pola perilakunya itu ia hidup dan menempatkan dirinya dalam masyarakat. Dengan kata lain ia telah mapan dengan perilakunya.¹⁷

Sesuai dengan perkembangan waktu, jumlah lulusan SMTA dari tahun ke tahun makin meningkat. Pada tahun 1982, jumlah lulusan itu kira-kira 320 ribu orang. Pada tahun 1983 meningkat menjadi 350 ribu orang. Pada tahun 1986 diproyeksikan sebanyak 750 ribu orang.¹⁸ Sedangkan daya tampung perguruan tinggi negeri dan swasta diperkirakan hanya 100 ribu orang tiap tahunnya.¹⁹ Oleh karena itu Presiden Soeharto sewaktu meresmikan pendirian Universitas Terbuka menyatakan bahwa Universitas Terbuka merupakan jawaban yang tepat untuk memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi dalam kondisi dan situasi kehidupan masyarakat dewasa ini.²⁰

Meskipun masalah jumlah lulusan SMTA yang besar itu memang menakutkan, hal itu dapat mengaburkan fakta bahwa apa yang sebenarnya dibutuhkan bukan hanya pendidikan yang lebih banyak, tetapi suatu pendidikan yang mampu menyesuaikan perubahan yang sangat cepat dengan tingkat akumulasi pengetahuan. Tak cukup lagi kini hanya berpikir mengenai perolehan pengetahuan sebagai tujuan akhir pendidikan. Sebaliknya, tantangan yang muncul adalah untuk mengembangkan suatu kemampuan belajar terus-menerus, baik individual maupun masyarakat, untuk mempelajari berbagai tanggapan yang kreatif dan penaksiran yang kritis. Jelas bahwa proses belajar itu tidak terbatas pada anak-anak atau yang buta huruf.²¹

Jadi karena adanya kebutuhan untuk meningkatkan daya tampung perguruan tinggi, Universitas Terbuka didirikan. Dengan demikian tuntutan belajar mandiri itu menjadi nyata, karena di dalam Universitas Terbuka diterapkan cara belajar mandiri. Oleh karena itu sebaiknya calon mahasiswa

¹⁷ Waskito Tjiptosasmoro, *Beberapa Studi tentang Efektivitas Mengajar di Indonesia* (Jakarta: BP3K, 1978), hal. 19.

¹⁸ Santoso S. Hamijoyo, dikutip dari Drs. A. Suryadi MA, *op. cit.*, hal. 13.

¹⁹ Drs. A. Suryadi MA, *op. cit.*, hal. 13.

²⁰ Lihat *Sinar Harapan*, 4 September 1984.

²¹ Lihat Soedjarmoko, "Tantangan Belajar untuk Abad Ke-21," *Manajemen*, No. 24, Tahun IV (Jakarta: LPPM, 1984), hal. 50.

Universitas Terbuka dipersiapkan belajar mandiri sejak mereka duduk di bangku SMTA. Inilah saat yang tepat bagi guru untuk menyesuaikan gaya mengajarnya guna lebih menumbuhkan peran-serta anak didik. Dalam proses belajar mengajar anak didik sebaiknya didorong untuk berani mengambil inisiatif. Penyesuaian diri guru dengan cara belajar siswa secara aktif sudah sepantasnya mendapat penghargaan dari pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Walaupun pengelola Universitas Terbuka tidak dapat memaksa guru SMTA untuk melatih anak didiknya belajar mandiri, sistem belajar di Universitas Terbuka tetap menuntut mahasiswanya belajar mandiri. Pada tahun ajaran 1985/1986 ini Universitas Terbuka akan memilih calon mahasiswa yang lebih mampu menetapkan pilihan bidang studinya. Upaya itu dapat dilakukan dengan menjadikan Universitas Terbuka sebagai pilihan pertama dan kedua bagi calon mahasiswa yang melamar melalui Sipenmaru. Setelah mereka dapat menentukan pilihannya sesuai dengan minat dan kemampuannya, calon mahasiswa Universitas Terbuka diharapkan lebih bermotivasi. Dengan demikian mereka diharapkan memiliki semangat belajar yang tidak mudah padam, karena mempunyai sesuatu kepentingan yang harus diperjuangkan dengan jalan belajar itu.

Tanpa kesediaan mental itu para mahasiswa pada umumnya tidak dapat bertahan terhadap berbagai kesukaran di Universitas Terbuka. Menurut The Liang Gie, sikap mental yang perlu dimiliki oleh setiap mahasiswa sekurang-kurangnya meliputi empat segi, yaitu tujuan belajar, minat terhadap pelajaran, kepercayaan pada diri sendiri dan keuletan.²²

Tujuan belajar yang berkaitan erat dengan cita-cita di masa depan merupakan suatu pendorong untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Mahasiswa yang tidak menyadari tujuan belajarnya memiliki semangat belajar yang mudah padam, karena ia tidak merasa mempunyai suatu kepentingan yang harus diperjuangkan.

Minat terhadap pelajaran merupakan salah satu faktor yang memungkinkan mahasiswa belajar dengan penuh konsentrasi, dan menimbulkan kegembiraan belajar. Bila seorang mahasiswa memperbiasakan cara belajar yang baik disertai sikap yang penuh kegembiraan, maka tantangan kesukuran-kesukaran itu tidak akan terasa berat dan sukar.

Kepercayaan pada diri sendiri perlu sekali ditumbuhkan sebagai salah satu persiapan mental untuk belajar di Universitas Terbuka. Kepercayaan itu dapat ditumbuhkan dan dikembangkan dengan belajar tekun. Tidak ada mata pe-

²²The Liang Gie, *op. cit.*, hal. 9.

lajaran yang tidak dapat dimengerti bila mahasiswa mau belajar dengan giat setiap hari. Mahasiswa hendaknya tidak menggantungkan diri kepada teman dalam usaha belajarnya. Latihan dan test formatif sebaiknya dikerjakan seorang diri pula. Dalam mengerjakan test formatif itu sebaiknya mahasiswa mendisiplinkan diri tanpa melihat kunci jawabannya sebelumnya. Kalau menjumpai hal-hal yang sulit dan tidak mengerti sewaktu membaca bahan-bahan yang tercetak (modul), janganlah terlalu cepat bertanya kepada orang lain. Berusahalah sendiri terlebih dahulu, misalnya dengan bertekun di perpustakaan menelaah buku-buku lainnya. Bila semua hal itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri pasti akan tumbuh.

Keuletan membuat mahasiswa berani menghadapi setiap kesukaran dan tidak mudah putus asa. Untuk memupuk keuletan itu hendaknya ia selalu menganggap setiap persoalan atau kesukaran yang muncul sebagai suatu tantangan yang harus diatasi. Dengan memiliki keuletan yang besar, seorang mahasiswa pasti akan berhasil menyelesaikan program belajarnya di Universitas Terbuka.

Agar dapat menyesuaikan diri dengan cara belajar mandiri, mahasiswa hendaknya menyusun jadwal kegiatan belajar harian. Bagi mereka yang bekerja biasanya waktu antara jam 5.00 sampai 7.00 pagi merupakan waktu yang terbaik untuk belajar secara intensif. Belajar dengan penuh konsentrasi selama satu jam misalnya akan memberikan hasil yang lebih banyak daripada belajar dua atau tiga jam dengan pikiran yang tidak mantap. Bagi mahasiswa yang telah berkeluarga atau bekerja sehingga waktu belajarnya sempit, lebih-lebih kemampuan konsentrasi merupakan suatu keharusan agar setiap menit yang dipakainya untuk belajar dapat memberikan hasil yang maksimal.

Jadwal kegiatan belajar harian itu hendaknya tidak disusun muluk-muluk, sehingga dapat dilaksanakan secara teratur dan disiplin. Secara demikian seorang mahasiswa dapat memiliki kebiasaan belajar yang baik. Sifat bermalas-malasan, keinginan mencari gampangnya saja, keseganan untuk bersusah-payah memusatkan pikiran, kebiasaan untuk melamun dan gangguan-gangguan lainnya sering menghinggapi kebanyakan mahasiswa. Gangguan itu hanya bisa diatasi bila mahasiswa mempunyai *disiplin*. Belajar setiap hari secara teratur hanya mungkin dijalankan kalau seorang mahasiswa mempunyai disiplin untuk menaati jadwal kegiatan belajar hariannya.

PENUTUP

Sistem belajar mandiri yang diterapkan oleh Universitas Terbuka merupakan suatu sistem belajar yang berbeda dengan di SMTA. Oleh karena itu

mahasiswa Universitas Terbuka masih perlu untuk menyesuaikan diri agar dapat belajar mandiri. Penyesuaian diri itu perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak yang berhubungan dengan sistem pendidikan. Dukungan itu dapat berasal dari guru SMTA, dalam hal mana ia hendaknya mendorong anak didik agar terbiasa belajar sendiri.

Di samping itu, pengelola Universitas Terbuka sendiri perlu memperbaiki kekurangan-kekurangan pada modul, sehingga pelajaran lebih mudah dicerna. Kegiatan tutorial belum dapat dikurangi atau bahkan ditiadakan, sebelum sistem belajar mandiri itu menjadi kebiasaan para mahasiswa. Jumlah tutor hendaknya ditambah agar perbandingan antara tutor dan mahasiswa menjadi seimbang. Dalam rangka kegiatan tutorial itu, perlu dipikirkan kemungkinan penyelenggaraan tutorial khusus pada awal kuliah untuk menjelaskan metoda belajar mandiri. Sebagai pedoman belajar mandiri, pengelola Universitas Terbuka sebaiknya menerbitkan buku mengenai belajar bagaimana belajar mandiri.

Akhirnya perlu disadari bahwa perubahan ke arah sikap belajar mandiri itu tetap harus berasal dari dalam diri mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu mahasiswa yang ingin berhasil menyesuaikan sikap mentalnya dengan cara belajar mandiri hendaknya menyadari tujuan belajarnya, mempunyai minat terhadap pelajaran, kepercayaan pada diri sendiri dan keuletan. Secara demikian, mahasiswa Universitas Terbuka akan lebih mampu mengatasi setiap kesulitan dalam usaha mengatasi tantangan belajar mandiri.

Kemampuan dan keterampilan belajar mandiri, sebenarnya bukan saja merupakan kebutuhan mahasiswa Universitas Terbuka, tetapi juga kebutuhan semua orang; baik yang mengikuti program "sekolah klasikal," maupun yang tidak mengikuti program-program pendidikan yang formal. Sebab, belajar yang sebenarnya, adalah belajar mandiri dan *seumur hidup*.

Pendidikan Luar Sekolah Menyambut Masyarakat Belajar

M. Bambang WALGITO*

Menarik untuk dilihat betapa akhir-akhir ini beberapa harian terkemuka, baik harian ibukota maupun daerah, sibuk mengisi lembaran-lembarannya dengan aneka peristiwa dan ulasan seputar dunia pendidikan, baik mengenai mutu, jumlah anak didik yang dihasilkan oleh suatu jenjang pendidikan, rintihan para orang tua yang sibuk mencari lowongan kursi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun ramalan tentang jumlah peserta Sipenmaru yang konon "melejit" menjadi satu juta jiwa, dan sebagainya.

Menarik untuk disimak betapa semuanya itu merupakan suatu musim, yang pada saat-saat tertentu tampak mengganas, mengharukan siapa pun yang merasa diri sebagai warga bangsa. Suatu musim yang sesuai dengan iklim pemikiran serta budaya kita akan mereda dengan sendirinya dengan meninggalkan pertanyaan yang belum sempat terjawab: *what next*. Justru pada momen-momen peredaan inilah tulisan ini disajikan dengan harapan menggelitik sebagian besar warga bangsa. Andaikan pemikiran ini ikut tenggelam dalam arus peredaan, masih ada harapan, semoga apa yang disajikan ini paling tidak akan ikut hidup bergerak dalam kekuatan besar manusia, yakni "dunia bawah ambang kesadarannya." Dunia semacam itu penting karena akan memberi motivasi tertentu pada saat menghadapi krisis. Karena, yang terpenting adalah motivasi pemahaman kritis terhadap krisis yang terjadi di lingkungannya ataupun yang dialaminya sendiri kelak kemudian hari. Krisis tersebut cepat ataupun lambat akan terjadi. Dalam menghadapi tantangan, orang lantas mengambil sikap kritis dan dengan sikap kritis tersebut akan terpekat hasil utama, yakni *kemampuan ataupun kemandirian masing-masing individu* dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin kompleks.

*Staf CSIS.

Sebagai suatu irama, menarik pula untuk dikaji betapa "musim yang penuh hiruk-pikuk" yang terjadi setahun sekali ini semakin lama semakin melibatkan banyak orang muda Indonesia yang bagaikan "lautan" bergerak ke sana ke mari berebut meloloskan diri dari "lubang-lubang jarum" yang dirasa semakin menyempit. Paling tidak ada dua "lubang jarum" yang tampaknya saling bertentangan. Di satu pihak, bagaikan "gelombang samudra" manusia-manusia muda usia berebut tempat pendidikan sebagai pabrik ijazah yang -- entah dari mitos mana dan siapa bikin walahu'alam -- diidentikkan dengan jabatan pegawai dengan gaji enak dan hidup lumayan. Di lain pihak, muncul "lubang jarum" kedua, yakni lapangan kerja ataupun penciptaan lapangan kerja yang memiliki mekanisme tersendiri dengan aneka persyaratan keterampilan yang kiranya belum atau tidak dibekalkan pada hasil asuhan sekolah. Gerak meloloskan diri dari dua "lubang jarum" tersebut memberi dampaknya sendiri-sendiri, karena baik bagi yang berhasil lolos dari "lubang jarum" pertama apalagi yang gagal sama-sama didorong oleh kebutuhan yang sama dengan dimensi yang makin hari makin tampak menjadi cuma satu, yakni "menjadi pegawai." Apakah berdimensi satu ini sudah membudaya atau belum dapat dikaji dari keras-lembutnya "irama musiman" yang terjadi setiap tahun.

Lebih menarik pula untuk dibaca betapa masyarakat seolah-olah menerima semuanya itu sebagai suatu kenyataan yang tak terelakkan, yang akhirnya diterima sebagai suatu kewajaran tanpa sempat bertanya diri "wajarkah semuanya ini?" "akan dibawa kemanakah manusia-manusia muda yang tidak berhasil lolos lubang jarum pertama apalagi kedua?" "sekiranya mereka itu dapat tenang di luar musim gejolak tahunan karena kuatnya 'tanggul' (manusia pekerja atau produktif yang memberi mereka makan dan tempat bernaung) mungkinkah mereka itu hanya bergerak pada musim tertentu saja dan tidak di luar musim karena jebolnya beberapa 'tanggul' akibat kelebihan beban?" Pertanyaan-pertanyaan semacam ini tentu pernah tersirat dalam benak setiap orang.

Ada beberapa usaha penting yang sudah dan sedang dilakukan, seperti akan disinggung sekilas dalam tulisan ini, yang pada hakikatnya tampak sebagai usaha memperbesar lubang jarum yang telah ada, yang tentunya diharapkan tidak sekedar *symptomatic treatment*. Adanya sekolah-sekolah "Terbuka" baik SLTP, SLTA, ataupun bahkan Universitas yang "Terbuka," yang dengan bertambahnya usia diharapkan memiliki mekanisme kerja yang efektif dan mampu menyalurkan hasrat manusia-manusia muda tersebut. Namun, dapat dipertanyakan apakah itu bukan sekedar usaha memperbesar *satu* lubang jarum saja yang akhirnya akan membangkitkan atau semakin menumbuhkan budaya berdimensi satu seperti tersebut di atas?

Apakah sekolah ataupun universitas yang "terbuka" sudah memiliki mekanisme kerja yang efektif atau belum tentu bukan tempainya disinggung dalam tulisan ini. Untuk memiliki sistematika kerja yang baik, dengan sendirinya dibutuhkan waktu dan pengalaman untuk tidak sekedar menjadi kursus tertulis, sebab dapat diduga bahwa penanganan distribusi dan evaluasi pun sudah merupakan kerja yang aduhai dilihat dari kacamata mereka yang tiap hari berkecimpung di dunia pendidikan langsung, yang bukan sekedar pengamat dari luar; belum lagi masalah proses belajar-mengajar yang masih membutuhkan berbagai pengandaian untuk dapat efektif dan efisien.

Ada beberapa usaha menarik lainnya, baik berupa usaha konkret, seperti munculnya BLK (Balai Latihan Kerja), lembaga-lembaga politeknik di berbagai kota besar di Jawa dan Sumatera, maupun seruan-seruan dan himbauan. Tak urung almarhum Mendikbud sendiri dalam berbagai kesempatan mengajak seluruh masyarakat untuk mengubah pola berpikir yang terlalu mendewakan perguruan tinggi, bahkan media massa pun diajak berpartisipasi secara aktif untuk mempropagandakan sekolah-sekolah kejuruan baik menengah maupun tinggi.¹ Kesemuanya itu merupakan usaha mengubah tata nilai yang terlanjur membudaya. Perubahan yang diinginkan ini pada hakikatnya merupakan karya "raksasa" yang tak mungkin dibebankan pada pemerintah ataupun satu departemen (Depdikbud) apalagi pada pundak seorang manusia kendati itu Mendikbud walaupun bisa diawali lewat "mulut" satu manusia.

MENGACA SEJARAH

Dalam sekilas membolak-balik sejarah pendidikan di bumi Nusantara ini sejak jaman kolonial sampai hari ini, terlihat jelas perubahan pesat mengenai kuantitas dan kualitas manusia Indonesia yang sempat mengenyam pendidikan menengah dan tinggi. Jika di jaman kolonial hanya beberapa gelintir manusia Indonesia, baik pribumi maupun keturunan asing, diperkenankan mengenyam pendidikan tinggi di Stavia ataupun Sekolah Tinggi Teknik Bandung (antara lain Ir. Soekarno, Proklamator dan Presiden Pertama RI), maka jumlah tersebut sudah meningkat tajam dalam kurun satu generasi.

Di kala manusia terdidik masih merupakan "makhluk langka," telah tumbuh dalam tubuh masyarakat sendiri gerakan pendidikan yang dapat dibilang Pendidikan Luar Sekolah. Kecil mungkin peran dan jumlahnya jika dilihat dari ruang lingkup nasional dan kiranya juga perlu penelitian meluas dan mendalam tentang jumlah dan siapa-siapa yang merupakan hasil penggodokan

¹Lihat *Tajuk Harian Sinar Harapan*, 29 Mei 1985.

lembaga-lembaga semacam itu. Yang jelas mereka itu memang ada, kendati dianggap kecil dan dipandang sebelah mata. Begitu tidak berarti tampaknya sampai-sampai eksistensinya tidak ikut terekam apalagi diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah yang masih berlaku sampai hari ini. Betapapun, mereka tetap ada bahkan tumbuh subur terlebih akhir-akhir ini. Suatu angin segar telah bertiup kendati belum membawa perubahan arus bagi "lautan" manusia muda yang tampak bergolak hanya di musim tertentu saja.

Lembaga-lembaga kecil yang sering dipandang sebelah mata ini akhirnya sempat terekam oleh para wakil rakyat dan dicetuskan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN dan yang kemudian secara lebih jelas lagi terungkap dalam Tap MPR No. II/MPR/1983 juga tentang GBHN dalam Bab Pendidikan. Jika dalam Tap No. IV/MPR/1978 kita jumpai formulasi: "Pendidikan juga menjangkau program-program luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan", dalam Tap MPR No. II/MPR/1983 kita baca: "Pendidikan luar sekolah, yaitu pendidikan yang bersifat kemasyarakatan", maka kelihatan ada suatu perubahan *sikap* dalam masyarakat itu sendiri. Formulasi tersebut memang dapat dibilang merupakan suatu momen-momen opname yang tentu harus dibaca pula apa yang tersirat di dalamnya. Membaca yang tersirat umumnya lebih menarik apalagi kalau disertai secercah harapan semoga dalam Tap berikut terungkap formulasi yang lebih jelas dan merangsang.

Harapan tak akan kunjung tiba apabila pernyataan yang tersurat dan tersirat dalam Tap MPR tadi hanya berhenti menjadi kumpulan aksara yang mati. Apa yang direkam di situ bukanlah "benda mati" namun "benda hidup" yang dalam sejarah pendidikan di Indonesia terbukti merupakan "benda tahan bantingan," benda yang memiliki daya hidup tinggi. Satu hal yang jelas bahwa benda tahan bantingan tersebut bukan "anak haram" kendati bukan "anak emas" dan memang tidak perlu menjadi anak emas sebab akan berada di luar jalur dan proporsi yang wajar sehingga mungkin akan mengurangi daya hidupnya yang tinggi.

Daya hidup tinggi itu dimungkinkan karena lembaga-lembaga PLSM, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Diklusemas (Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat) berakar kuat pada masyarakat, masyarakat yang sadar akan kebutuhannya, masyarakat yang haus akan kemajuan. Dari program latihan dan pendidikan yang sederhana, terlihat adanya latihan berpikir yang membuat manusia berusaha membebaskan diri dari segalah impitan dan ketergantungan. Di sini terlihat betapa manusia berusaha keras membantu dirinya sendiri mendada masa depan. Masa depan bukan sekedar diartikan sebagai lapangan kerja, tetapi lebih luas lagi dan luhur, yakni pertumbuhan manusia dari yang sadar akan kekurangannya menjadi manusia

yang memiliki keterampilan dan ilmu. Dalam hal ini daya kreativitas manusia tergugah.

Kreativitas merupakan istilah yang agaknya terlalu banyak di "dengang-dengungkan" sedemikian rupa sehingga tampak begitu luhur hingga seolah jauh dari jangkauan manusia biasa. Dari apa yang terjadi dalam gerak pendidikan luar sekolah ini terlihat betapa ada sebagian warga masyarakat yang tergerak untuk secara ethis turut serta mencerdaskan atau meningkatkan bakat anggota masyarakat lainnya sampai titik optimal sesuai dengan harkat dan hakikat masing-masing individu. Gerak mereka itu mungkin kecil dan bisa jadi sederhana. Tetapi bukankah perkembangan-perkembangan pesat seringkali berawal dari yang kecil?² Bukan hal yang aneh bahwa beberapa "warga belajar" (sebutan yang dalam pendidikan formal berarti murid) bahkan pula pengasuh Diklusemas atau PLSM merupakan otodidak yang sebenarnya kelewat sayang apabila dilewatkan begitu saja. Seperti pernah disinyalir oleh Bachtiar W. Rifai³ banyak otodidak yang "kelewat ulet" yang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh dunia pendidikan formal. Tentu amat disayangkan apabila sinyalemen tersebut benar. Memang dibutuhkan kejelian tersendiri untuk menangkap mereka, belum lagi masalah fleksibilitas birokrasi dan tolok ukur persyaratan yang berlaku. Seandainya banyak dari mereka dapat "ditangkap" barangkali hal ini akan memberi gambaran tersendiri dalam persepsi kaum muda bahwa ada alternatif lain untuk menjadi sukses, pandai, ataupun berhasil. Jadi bukan sekedar lewat satu jalur yang diperebutkan seperti sekarang ini.

MENUJU MASYARAKAT BELAJAR

Kendati mungkin tidak dapat diterima sepenuhnya ide-ide revolusioner dari beberapa *innovator* terkemuka karena kondisi dan situasi sosial kita mungkin berlainan, namun ada baiknya disimak sejenak beberapa buah pemikiran Ivan Illich yang menggelitik hati sanubari siapa pun yang membacanya. Dalam bukunya yang menarik seperti "Deschooling Society" ataupun dalam artikel-artikelnya misalnya "Alternative to schooling" dengan tegas dikatakan: "In order to see clearly the alternatives we face, we must distinguish education from schooling"⁴ Di sini tampak ia mengimbau ma-

²Slamet Sutrisno, "Universitas Terbuka Kondisi Awal Bagi Masyarakat Belajar," *Suara Karya*, 14 Februari 1984.

³Lihat, *Suara Karya*, 8 Mei 1984.

⁴Ivan Illich, "The Alternative to Schooling" dalam John Martin Rich, *Innovations in Education, Reformers and Their Critics* (Boston, London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon, Inc., 2nd edition, 1978), hal. 142-153; lihat juga Ivan Illich, *Deschooling Society* (London: Galdei & Boyars, 1974).

syarikatnya untuk melepaskan anggapan bahwa apa yang tidak diberikan lewat sekolah seolah-olah tidak bermutu, seolah hanya sekolahlah yang mampu memberi bekal bermutu bagi para remaja dalam memasuki kedewasaannya dalam masyarakat. Lagipula, dengan gaya menggelitik dikatakannya: "learning *about* the world is more valuable than learning *from* the world."⁵

Tentulah bukan dimaksudkan di sini untuk ramai-ramai membubarkan sekolah, sebab pendidikan formal dan umum memang mutlak diperlukan, bahkan eksistensi pendidikan tinggi mutlak tidak dapat ditawar lagi. Bahwa kurikulum perlu diperbaharui untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, semua orang sudah maklum dan memang sedang terus-menerus dilakukan oleh mereka yang berwenang, dalam hal ini Depdikbud dengan segala aparatnya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa dalam situasi seperti sekarang ini negara dan masyarakat amat membutuhkan suatu *Elite Intelektual* yang diharapkan mampu dilahirkan oleh aneka pendidikan tinggi di negara kita. Suatu kelompok *Elite Intelektual* dalam arti yang baik seperti baru-baru ini diutarakan J. Drost, seorang pendidik dan pengamat masalah sosial-budaya, "... mustahil suatu negara dapat maju pesat tanpa dukungan kelompok *Elite Intelektual*.⁶ Kelompok ini tentu diharapkan untuk tidak bercita-cita menjadi pegawai, apalagi pegawai negeri, namun pemikir, politisi, pencipta lapangan kerja dan sebagainya, yang penuh harapan luhur.

Harapan luhur tersebut untuk masa sekarang mungkin dirasa terlalu tinggi kendati bukan kemustahilan. Bukan barang yang aneh sekiranya para pengelola, pengasuh, maupun pengajar pendidikan tinggi swasta dituntut kreativitas tinggi untuk *survive* dan kalau dapat unggul dari yang lain. Hal ini hanya akan dapat diraih apabila mereka mampu, jeli, dan pandai dalam *memainkan peran* "mengikuti panutan" di satu pihak dan "mencari" panutan di lain pihak. Yang dimaksud dengan "mengikuti" di sini adalah menuruti dan mencontoh standar yang berlaku atau mengaca pada perguruan tinggi negeri yang harus dijadikan panutan, sedangkan "mencari" berarti "belajar" dari apa yang biasa diberikan oleh *mereka yang terbaik* dalam lingkup nasional, regional, maupun dunia internasional dengan harapan bahwa produk mereka dapat "laku" dengan mudah di masyarakat. "Laku" di sini bisa diartikan "gampang memperoleh pekerjaan." Pada akhirnya, masyarakat itu sendirilah yang menilai mana yang baik dan mana yang kurang. Karena masalah ini merupakan masalah peka yang menyangkut hidup matinya institut dan secara langsung mempengaruhi "periuk nasi" para pengelola, karyawan edukatif dan lain-lain, maka dengan sendirinya mereka terpaksa menjadi mahir, ulet berkat "godokan" alam.

⁵*Ibid.*, hal. 144.

⁶Lihat *Surabaya Post*, 24 Mei 1985.

Ada berbagai himbauan untuk segera mendirikan banyak sekolah keju-ruan. Prof. Andi Hakim Nasution, misalnya, bahkan menyerukan supaya kita berhenti omong tetapi langsung berbuat sesuatu, supaya budaya omong segera dihapuskan.⁷ Ajakan ini yang lebih banyak diserukan bagi jajaran Depdikbud sendiri kiranya terlalu sayang kalau dilewatkan begitu saja. Semoga dan tentu amat dinantikan oleh seluruh masyarakat.

Berbagai ajakan yang disinggung di atas pada akhirnya harus bermuara pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang dimaksudkan di sini bukan masyarakat muda yang lebih banyak disorot selaku pelaku utama dalam drama besar yang berkiprah di musim khusus ini, namun seluruh masyarakat perlu belajar, bukan sekedar belajar dari pengalaman namun belajar tentang realita konkret yang ada. Mumpung peringatan "Hardiknas" bahkan "Harkiinas" belum lama lewat dan masih dapat ditimba hikmah karena "gema"-nya tentulah masih bersisa. Dengan "mengaca sejarah" seperti disinggung di atas, masyarakat perlu belajar bahwa dia mampu berbuat sesuatu untuk dirinya, dan tidak menanti uluran orang lain, dalam hal ini pemerintah atau Depdikbud. Seorang montir jalanan yang terbuka hati dan sadar akan kemampuannya dapat mengambil beberapa pemuda untuk dididik menjadi "asisten"-nya yang nanti akan mampu meringankan "cucuran keringat"-nya namun yang sekaligus mampu mempertebal "kocek"-nya. Sudah barang tentu pertama-tama mereka ini harus dianggap bukan sebagai saingan atau calon saingan yang akan menguruskan koceknya, sebab membuat orang menjadi saingan atau kawan/rekan memang ada ilmunya. Ilmu itu tak lain hanyalah "keterbukaan dan ketulusan." Betapapun orang tidak akan membunuh orang yang tulus yang telah membesarkannya dengan tulus. Pengangkatan asisten sering oleh para cerdik-pandai diberi istilah ilmiah seperti "career education" atau "pendidikan magang" seperti pernah dilontarkan dalam berbagai artikel dan tulisan di beberapa harian dan majalah.

MASYARAKAT BELAJAR

Masyarakat perlu belajar tentang dirinya dan situasi yang tengah dihadapi. Menghadapi ledakan lulusan SD, SLTP dan SLTA Kejurnan ataupun Umum, belum lagi lulusan perguruan tinggi bahkan juga yang putus sekolah yang "berlomba dengan segala akal untuk dapat lolos dari dua lubang jatuh" tersebut di atas, masyarakat secara keseluruhan perlu belajar. Cepat atau lambat akan semakin *disadari* bukan sekedar *diketahui* bahwa jumlah mereka yang tidak dapat ditampung akan semakin melampaui jumlah mereka yang berhasil ditampung, belum lagi kurangnya lapangan kerja.

⁷Lihat, harian *Sinar Harapan*, 30 Mei 1985.

Masyarakat yang menyadari situasi semacam itu dan berusaha sendiri mengatasi masalah mereka merupakan *masyarakat belajar* yang baik. Mereka akan belajar betapa lama menunggu uluran pihak lain sebab semuanya itu bukannya tanpa proyek dengan DIP-nya segala. Menunggu turunnya proyek akan sama dengan membiarkan bagian dari dirinya terbenam dalam "neraka frustrasi" yang dapat berakibat macam-macam. Perkembangan PLSM atau Diklusemas pada situasi seperti sekarang ini merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi sebab hal ini merupakan usaha masyarakat yang ingin menolong dirinya sendiri. Di samping lembaga yang sudah ada dan yang diharapkan tumbuh subur ini, tentunya diharapkan muncul pula lembaga-lembaga sejenis yang diawali dari tawaran para cerdik cendekia atau para ahli di bidangnya masing-masing, yang dengan sendirinya berdedikasi serta memiliki jiwa *entrepreneurship* yang lumayan. Uluran tangan semacam itu apabila ditangkap oleh para "tokoh" masyarakat yang merasa terlibat dan ikut memiliki "hitam-putihnya" bangsa ini akan menyuburkan "ladang-ladang" baru di tengah-tengah gejolak masyarakat luas.

Makhluk kuno yang sebenarnya sudah tumbuh sejak jaman kolonial dan terbukti memiliki daya hidup tinggi dapat diharapkan menjadi salah satu alternatif di samping pendidikan formal umum dan kejuruan. Dengan munculnya lembaga-lembaga tersebut kendati mungkin tidak begitu besar di sana-sini, paling tidak ada 2 keuntungan yang dapat diraih: (a) masyarakat terbina menjadi *warga belajar*, dan (b) masyarakat tidak kehilangan daya pikir kritis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka ataupun lingkungan mereka sendiri.

Memang ada kemungkinan mereka itu pertama-tama muncul sebagai suatu institusi komersial yang tidak memiliki sasaran edukatif yang jelas dan mapan. Kendati ada badan resmi dengan falsafah *tut wuri handayani* bertugas tidak hanya mengatur izin serta lalu-lintas pemunculan lembaga-lembaga semacam itu di masyarakat dan membinanya, namun menghadapi situasi semacam itu daya pikir kritis masyarakat pelan-pelan terbina. Di sini berlaku komunikasi dua arah di mana masyarakat secara kritis didorong oleh kebutuhan bersama akan pengetahuan dan keterampilan akan menilai sendiri mana yang bermanfaat dan mana yang tidak. Lembaga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan konkret tersebut akan tidak laku dengan sendirinya. Para pengasuh dan pengelola pun akan terpaksa belajar dari keadaan konkret masyarakatnya. Dengan didorong kebutuhan untuk survive, mereka akan belajar untuk menjadi "yang laku" di masyarakat, belajar mencari "nilai lebih" yang membuat mereka tampak unggul dibandingkan dengan yang lain.

Fleksibilitas "kurikulum" Diklusemas sebenarnya merupakan keunggulan tersendiri yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan kurikulum pen-

didikan formal. Bertolak dari realita konkret mereka berusaha menyediakan hal-hal riil dan konkret yang amat diperlukan. Dalam hal ini "kurang laku-nya" pendidikan formal kejuruan yang kini diharapkan kembali digalakkan agar laku, merupakan pelajaran yang baik karena input-input masyarakat tidak tersalurkan. Mereka dididik seolah-olah untuk menerima saja apa yang disajikan tanpa diajak turut serta mencari apa yang terbaik bagi mereka sendiri. Hubungan yang menonjol dalam dunia Diklusemas bukanlah hubungan antar guru dan murid, namun lebih antar sesama *warga belajar* yang sama-sama bertekad dalam kebersamaan men-''dada'' hari esok yang cerah. Bukan barang tabu bila dalam kebersamaan ini ikut tertimba pula kenikmatan spiritual dan material. Bersama sebagai warga belajar mereka terbiasa hidup dalam situasi non-formal yang tidak terlalu kaku. Peningkatan karir atau usaha bukanlah barang tabu dalam situasi yang tidak kaku ini.

"Kecerahan" hari esok yang digambarkan di atas akan kembali menjadi "gelap," apabila program konsolidasi yang dicanangkan HP-PLSM (Himpunan Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah oleh Masyarakat) tidak berjalan lancar. Sebagai satu-satunya organisasi sosial-kultural di bidang pendidikan luar sekolah yang menjadi partner pemerintah, HP-PLSM yang baru didirikan pada tanggal 31 Agustus 1982 perlu terus-menerus mengkonsolidasi diri agar dapat dipertegas lagi identitas diri di tengah masyarakat belajar, sehingga masyarakat itu sendiri akan tertolong apabila pintu sekolah sudah tertutup bagi mereka. Konsolidasi yang bertahap, sistematis dan berkesinambungan sebagaimana diungkapkan oleh Drs. Setiadi Kartohadikusumo⁸ merupakan pemberahan dan peningkatan baik perangkat lunak (landasan hukum, landasan kerja, pola pembinaan dan pengembangan organisasi PLSM) maupun perangkat keras (organisasi dan tata kerja, program kerja jangka pendek/menengah/panjang, personalia, modal kerja, administrasi pendidikan dan lain-lain), di tingkat pusat maupun daerah.

Mengaca hiruk-pikuk musiman yang merupakan masalah seluruh masyarakat, peran-serta PLSM atau Diklusemas yang terus-menerus mengkonsolidasi diri itu diharapkan mampu mengubah nilai-nilai masyarakat sehingga mereka tidak lagi mengarah ke berdimensi yang cuma satu, yakni berebut ijazah yang diidentikkan dengan menjadi pegawai, apalagi pegawai negeri semata.

⁸Drs. Setiadi Kartohadikusumo, *Konsolidasi Organisasi HP-PLSM Indonesia Sebagai Prasyarat Untuk Memelihara Kemampuannya dalam Mencapai Suatu Tujuan*, 17 Agustus 1984.

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peranan Perancis: Pendekatan Pendidikan*

C.P.F. LUHULIMA

Negara-negara sedang berkembang umumnya menyadari bahwa pembangunan nasional tidak hanya tergantung pada sumber daya alam dan kemajuan teknologi, tetapi terlebih-lebih pada pengembangan sumber daya manusia dan organisasi serta manajemen kegiatan mereka secara tepat.

Bagi negara yang padat penduduk seperti Indonesia, sumber daya manusia memiliki dua ciri yang jelas: dalam pengertian yang paling luas ia berarti spektrum penduduk secara menyeluruh, yakni strukturnya, tingkat kenaikannya, distribusinya, pendidikan, ketenagakerjaan, kesejahteraan, dan lain-lain. Dalam pengertian yang lebih sempit ia berarti keseluruhan proses peningkatan keterampilan, pengetahuan dan kemampuan mereka dalam usaha terus-menerus untuk mempercepat kemajuan.

STRUKTUR SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

Untuk memahami masalah yang dihadapi Indonesia dalam usaha pengembangan sumber daya manusianya, sebaiknya ditunjuk beberapa parameter kependudukan. Dewasa ini penduduk Indonesia berjumlah sekitar 160 juta dan diperkirakan akan meningkat menjadi 210 juta menjelang tahun 2000. Penduduk wanita terdiri dari separuh jumlah penduduk Indonesia (50,29%).

*Terjemahan makalah C.P.F. Luhulima, "Human Resources Development and France's Role: The Educational Approach," yang disampaikan pada Konferensi Indonesia-Perancis Ke-11, yang diselenggarakan oleh Centre for Strategic and International Studies (Jakarta) dan Kementerian Luar Negeri Perancis di Paris, 22-24 April 1985. Diterjemahkan oleh Redaksi. Dr. C.P.F. Luhulima adalah Ahli Peneliti Utama, Lembaga Riset Kebudayaan Nasional (LRKN), LIPI.

Distribusi penduduk antara Jawa dan pulau-pulau lainnya masih sangat tidak berimbang. Hampir 100 juta penduduk bermukim di Jawa yang merupakan pulau terkecil dari kelima pulau utama. Dua usaha utama yang sedang dilakukan secara bersamaan untuk membendung pertumbuhan penduduk di Pulau Jawa adalah keluarga berencana dan transmigrasi.

Angkatan kerja Indonesia terdiri atas mereka yang berumur antara 10 dan 64 tahun yang dianggap umur bekerja. Tenaga kerja Indonesia dewasa ini berjumlah 63 juta yang diproyeksikan akan berjumlah 90 juta dalam tahun 2000. Mutu tenaga kerja umumnya adalah masih rendah sebagaimana dicerminkan dengan rendahnya angka-angka produktivitas. Sebagian besar tenaga kerja Indonesia giat di daerah-daerah pedesaan dan tidak terampil. Tenaga kerja Indonesia yang setengah terlatih, yang terlatih dan terutama yang sangat terlatih masih sangat terbatas dan berbagai usaha sedang dilakukan untuk memperkecil jurang perbedaan.

Masalah utama dalam pasar tenaga kerja Indonesia adalah pengangguran. Pada 1983 pasar tenaga kerja hanya mampu menyerap sekitar 55 juta tenaga kerja yang berarti bahwa hampir 8 juta rakyat Indonesia menganggur. Pada 1988, menurut tingkat pertumbuhan penduduknya, angkatan kerja diperkirakan mencapai 72,7 juta, sedangkan kesempatan kerja hanya bertambah 2,1% yang berarti bahwa tenaga penganggur Indonesia akan berjumlah lebih dari 11 juta. Dilihat dari angkatan kerja yang baru, selama Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (1984-1989) harus diciptakan 9,3 juta kesempatan kerja.

Selain daripada masalah pengangguran terbuka, masalah kekurangan pekerjaan (under-employment) juga sama-sama mengganggu para perencana kebijakan Indonesia. Di daerah-daerah pedesaan, terutama di Jawa di mana tenaga-tenaga kerja yang baru dalam bidang pertanian meningkat secara eksponensial sedangkan ketersediaan tanah menurun, kita dihadapkan dengan masalah kekurangan pekerjaan, yakni orang-orang yang ingin bekerja tetapi terhambat oleh makin menurunnya kesempatan kerja. Suatu situasi yang berbeda terjadi di sektor pemerintah dan swasta. Di sini masalahnya adalah kekurangan pekerjaan secara terselubung. Pekerjaan yang harus dilakukan banyak sekali, tetapi akibat kelangkaan keterampilan dan ketidaksesuaian, banyak di antara mereka hanya setengah bekerja sehingga setengah-produktif. Sebagai salah satu akibatnya, tingkat pendapatan Indonesia adalah lebih rendah daripada di negara-negara ASEAN lainnya. GNP Indonesia per kapita pada 1982 berjumlah US\$ 550, dibandingkan dengan US\$ 1.840 untuk Malaysia, US\$ 820 untuk Filipina, US\$ 5.900 untuk Singapura, dan US\$ 800 untuk Muangthai.

Oleh karenanya perluasan kesempatan kerja produktif menjadi salah satu

sasaran utama kebijakan pembangunan nasional. Dan kesempatan kerja mengandung dua aspek penting: (1) pemanfaatan angkatan kerja secara produktif dalam sektor-sektor yang berkembang dalam perekonomian; dan (2) peningkatan produktivitas yang disertai dengan gaji/upah yang sesuai, baik dalam bidang kegiatan tradisional dan baru. Peningkatan produktivitas ini adalah sangat mendasar bagi kenaikan pendapatan riil dari tenaga kerja.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan dibahas struktur dan pola pendidikan dan latihan merupakan unsur-unsur kebijakan nasional yang amat penting yang ditujukan pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas angkatan kerja.

Jadi tugas kami yang paling penting di Indonesia adalah perlunya harmonisasi ketiga unsur kebijakan nasional saling berkaitan dalam pengembangan sumber daya manusia: perencanaan pendidikan, perencanaan tenaga kerja, dan perencanaan pengembangan. Setiap komponen ini dalam dirinya sangat rumit, sehingga perlu dikelola secara harmonis.

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan proyeksi struktur industri modern dan tradisional dan perluasan kesempatan kerja yang sepadan, bagan berikut ini menunjukkan pemikiran dasar tentang hubungan antara struktur pendidikan dan latihan dan angkatan kerja di Indonesia (lihat Bagan).

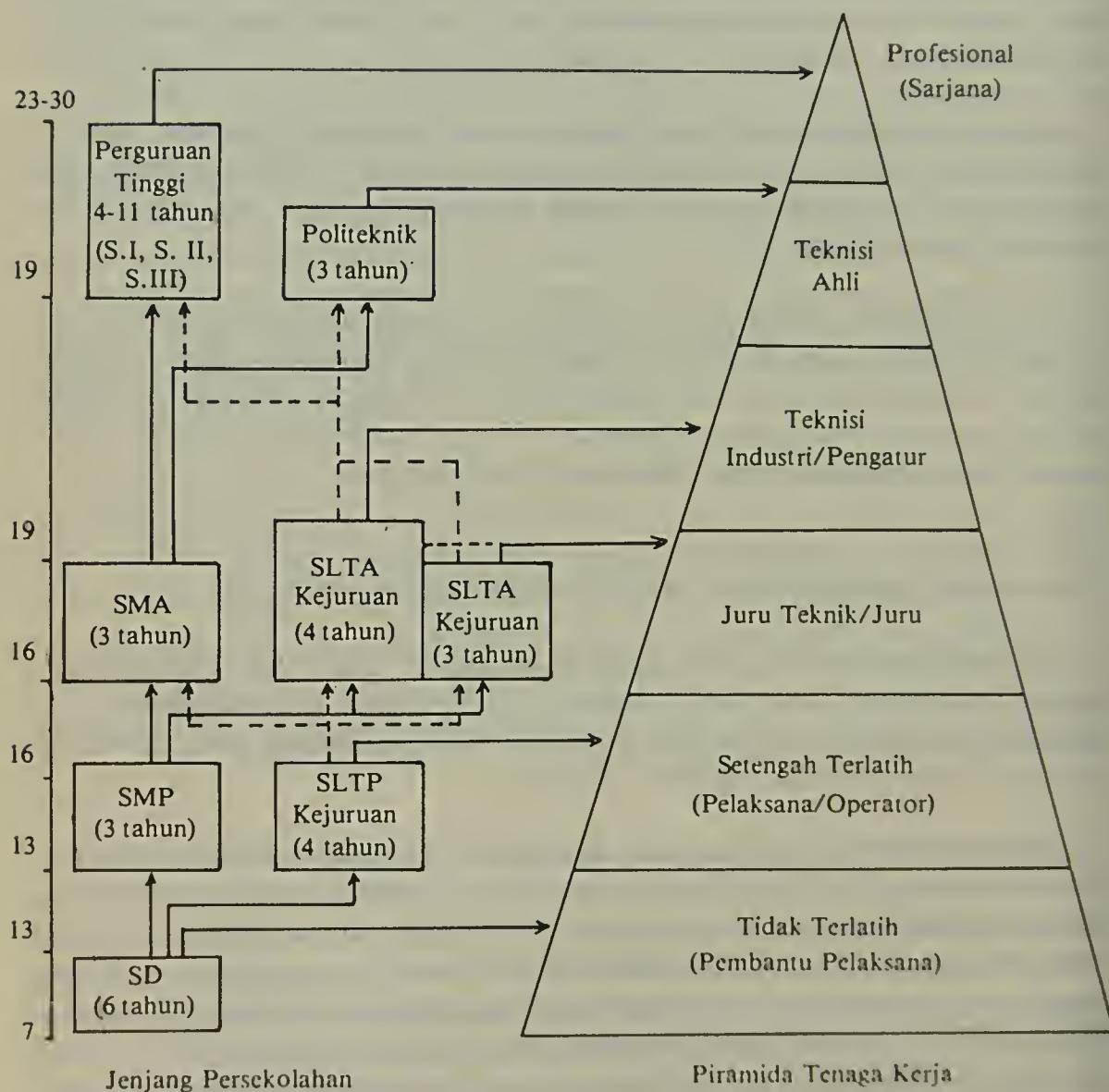
Uraian berikut ini terbatas pada dua unsur, yakni perencanaan pendidikan dan perencanaan tenaga kerja. Penulis tidak bermaksud untuk membahas secara mendalam kedua unsur bagi seluruh angkatan kerja, juga tidak untuk memadukan tujuan-tujuan tersebut dan arah untuk mencapainya. Apa yang penulis lakukan adalah secara sederhana untuk mengemukakan pemikiran mengenai usaha-usaha yang dilakukan dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia guna memenuhi tuntutan pembangunan nasional yang progresif.

Tugas yang harus dihadapi lembaga-lembaga pendidikan dan latihan dewasa ini adalah penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melayani berbagai lembaga penelitian dan pengembangan, kompleks industri-perdagangan dan lembaga-lembaga pendidikan dan latihan sendiri pada suatu tingkat yang terus meningkat akibat berhasilnya pelaksanaan ketiga Rencana Pembangunan Lima Tahun sebelumnya.

Rencana Pembangunan Lima Tahun Indonesia sekarang ini mulai dalam bulan April 1984 dan akan mempengaruhi suatu peralihan perekonomian per-

Bagan

STRUKTUR JENJANG PERSEKOLAHAN DAN PIRAMIDA TENAGA KERJA



Sumber: D.A. Tisna Amidjaja, *An Overview of Higher Education in Indonesia with Special Emphasis on Science and Technology* (Jakarta, 1984), hal. 37.

tanian ke suatu perekonomian pertanian dan industri yang seimbang. Secara institusional ini berarti bahwa suatu pergeseran dari dominasi lembaga-lembaga pertanian yang utama kepada lembaga-lembaga yang menitikberatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga-lembaga yang direncanakan untuk melayani sebagian besar peralihan ini adalah perguruan-perguruan tinggi, sekolah-sekolah politeknik dan sekolah-sekolah kejuruan.

Tuntutan ke arah pergeseran dari kegiatan-kegiatan pertanian tercermin dalam penekanan ilmu pengetahuan dan keahlian teknik, manajemen, pendidikan/pengajaran, pertanian, kesehatan kurang lebih di perguruan-perguruan tinggi. Prioritas ini membutuhkan investasi yang besar untuk mencapai standar internasional yang banyak dibutuhkan masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia. Khususnya untuk teknologi, diterapkan suatu "program pengembangan" (boosting programme) yang menjangkau teknik sipil, elektronik, teknologi mekanika dan kimia. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, usaha-usaha dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perguruan tinggi dengan cara:

1. perluasan dan pengembangan fasilitas-fasilitas fisik dan staf agar dapat menyerap lebih banyak mahasiswa;
2. meningkatkan pelayanan pada mahasiswa dan program-program kesejahteraan mahasiswa; dan
3. memperkuuh organisasi dan manajemen sistem universitas.

Untuk meningkatkan efektivitas perguruan tinggi, suatu sistem stratifikasi pendidikan yang baru diperkenalkan pada 1979.

- Stratum S.1 yang akan distandardisasi menjelang 1986 berdasarkan kurikulum inti/minimum bagi setiap bidang studi dan diukur dengan Sistem Kredit Semester. Kurikulum standar akan ditunjang oleh persyaratan khusus seperti perbandingan guru-murid, ketersediaan fasilitas-fasilitas dasar dan bahan-bahan pelajaran (buku, majalah, perangkat lunak komputer, dan lain-lainnya);
- Program Diploma akan diperluas. Walaupun 18 lembaga politeknik akan didirikan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun dewasa ini, secara serentak universitas-universitas didorong untuk menjajaki program-program diploma lainnya (D.1, D.2, D.3) yang bersifat padat modal dibandingkan dengan sekolah-sekolah politeknik tetapi memiliki daya serap yang tinggi, seperti program-program diploma di bidang perdagangan, jasa dan pertanian (pekerja penyuluh lapangan, penterjemah, dan lain-lain);
- Program S.2 dan S.3, yang sekarang sedang berjalan sebagai proyek percobaan di sembilan lembaga perguruan tinggi terutama akan menaikkan jumlah tenaga kerja ilmiah di universitas-universitas dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan.
- Program spesialis bukan gelar Sp I dan Sp II akan terus dikembangkan dalam bidang pendidikan kedokteran dan untuk mata pelajaran khusus dalam bidang teknik, seperti teknik jalan raya, bangunan bertingkat, manajemen proyek, dan lain-lain.

- Universitas/institut pendidikan yang lebih tinggi tertentu akan dikembangkan sebagai pusat pengembangan lembaga-lembaga yang sama di wilayah mereka. Universitas-universitas yang dimaksud adalah: (a) Universitas Hasanuddin di Ujungpandang untuk bagian Timur Indonesia; dan (b) Universitas Sumatera Utara dan Universitas Sriwijaya untuk bagian Barat Indonesia, di luar Jawa.
- Teknik "belajar jarak jauh" akan juga digunakan bagi penataran guru-guru dan dosen-dosen, dan untuk mengatasi kelangkaan anggota staf yang berpengalaman.

Untuk tingkat yang lebih rendah, pendidikan politeknik dimaksudkan untuk melatih teknisi-teknisi ahli, dengan program latihan yang berorientasi industri secara berimbang. Program ini terdiri dari hampir 45% kegiatan praktik dan laboratorium dan 55% pendidikan teori yang relevan selama masa pendidikan tiga tahun (hampir 5.000 jam). Program tersebut diarahkan pada hubungan antara teknik dan ekonomi terapan dan penerapan praktis dalam bisnis dan industri. Dewasa ini terdapat tujuh lembaga politeknik di Indonesia. Salah satunya Institut Politeknik untuk Mekanika terletak di Institut Teknologi Bandung dan didirikan dengan bantuan Pemerintah Swiss. Keenam lainnya dibangun dengan bantuan kredit Bank Dunia dengan spesialisasi teknik mekanika, elektrik, elektronik dan sipil dan terletak di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Malang.

Lebih dari sebelas sedang dibangun dengan program-program yang mencakup sipil, elektrik, elektronik, telekomunikasi, proses kimia, tenaga dan energi, pendinginan dan pengaturan suhu udara, aeronotika, pembuatan kapal, pengecoran logam dan perdagangan. Institut-institut ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada 1986. Sebuah sekolah politeknik pertanian juga direncanakan di masa mendatang.

Tingkat yang lebih rendah adalah sekolah-sekolah kejuruan yang khusus didirikan untuk mengembangkan tenaga-tenaga tukang yang ahli. Kurikulum mereka terdiri atas 50% kegiatan praktik dan sisanya teori-teori yang relevan dan menjangkau teknik, seni dan keahlian, musik, tarian tradisional, kegiatan sosial, ekonomi rumah tangga dan perdagangan. Sekolah-sekolah ini yang sebagian besar adalah sekolah-sekolah pemerintah, dibangun dan sedang dibangun dengan alokasi biaya dari budget dan pinjaman dari badan-badan seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Dewasa ini terdapat lebih dari 500 sekolah kejuruan dengan sekitar 22.500 lulusan setiap tahun. Namun banyak dari sekolah-sekolah ini harus dikembangkan dan disesuaikan.

KENDALA-KENDALA UTAMA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kendala-kendala utama yang dihadapi Indonesia dalam menjalankan program-program sumber daya manusia adalah menyoloknya kelangkaan guru dan pengajar, terutama yang bermutu dan berpengalaman. Negara-negara maju dapat mempekerjakan guru dan pengajar dari tingkatan insinyur dan teknisi dengan pengalaman bertahun-tahun di industri dan bisnis. Bagi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, cara mempekerjakan staf pengajar seperti itu masih merupakan suatu khayalan untuk beberapa alasan.

Industri Indonesia masih berada dalam masa pertumbuhan dan makanya memiliki masalah dalam merekrut tenaga yang bermutu untuk menjalankan berbagai kegiatan. Sebagai akibat, "pembajakan" tenaga yang bermutu di kalangan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri, terus berlangsung sehingga meningkatkan persaingan gaji di kalangan industri. Kedua, skala gaji di industri dan bisnis adalah jauh lebih tinggi daripada di sektor pendidikan sehingga menghalangi tenaga di sektor swasta beralih ke sektor pendidikan. Suatu sistem lain harus dipikirkan untuk menjadi basis bagi program latihan guru di masa mendatang dan bersifat jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan tuntutan tenaga kerja bermutu yang pada gilirannya mendingkatkan masyarakat Indonesia.

Usaha-usaha pengembangan sumber daya manusia kelihatan benar-benar sederhana dalam menghadapi tekanan masyarakat Indonesia yang mengejutkan pasar tenaga kerja, yang di satu pihak tidak dilengkapi dengan keterampilan dan kecakapan yang dibutuhkan, dan di lain pihak rendahnya jumlah kesempatan kerja padat modal.

PERANAN PERANCIS

Untuk memecahkan tuntutan pengembangan keterampilan dan kesempatan kerja, kita sering dibantu oleh negara-negara maju seperti Perancis. Misalnya, *Total Indonesia* adalah penghasil minyak mentah kedua terbesar di Indonesia walaupun Perancis termasuk ranking agak rendah di kalangan penanaman modal asing di negara ini. Dalam bulan Maret tahun 1984, juga perusahaan Perancis telah mengajukan permohonan investasi di Indonesia: SOGEE merencanakan untuk mendirikan pabrik serbuk kayu (paper pulp) patungan senilai US\$ 460 juta di Kalimantan Selatan; Club Mediterranee selanjutnya memperluas peralatan klubnya dengan membangun tempat rekreasi dan wisata senilai US\$ 170 juta di Nusa Dua, Bali; dan Peugeot mengajukan permohonan izin untuk membangun pabrik perakitan bak perseling yang bernilai US\$ 106 juta.

Pemerintah Indonesia telah mengakui reputasi Perancis dalam teknik otomotif, kimia, farmasi dan elektronik dan telah melakukan usaha-usaha penting untuk menarik para penanam modal Perancis untuk memperluas kesempatan kerja di bidang-bidang tersebut. Pembentukan Perwakilan Koordinasi Penanaman Modal Asing (Investment Coordinating Agency) di Paris dalam bulan Januari 1982 merupakan bukti yang jelas akan hal itu.

Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kerjasama resmi dimulai dalam bulan September 1969 walaupun program aktual baru dilaksanakan pada 1974 dengan penandatanganan perjanjian antara Universitas Indonesia dan *University of Montpellier III* untuk program-program pasca sarjana bahasa Perancis dan sastra. Perjanjian ini segera diikuti oleh perjanjian antara Institut Teknologi Bandung (ITB) dan *University of Montpellier I* dan *II*, antara Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan *Institut International de l'Administration Publique*. Beberapa tahun sesudahnya pada 1979, Menteri Penelitian Perancis dan rekan Indonesianya menandatangani perjanjian kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai tindak lanjut dari persetujuan-persetujuan, sekitar 70 lulusan Universitas Indonesia dan pejabat pemerintah berangkat ke Perancis setiap tahun untuk studi gelar dan bukan-gelar. Kebanyakan para pelajar ilmu pengetahuan dan teknologi menerima beasiswa Perancis (berkisar antara 30 dan 50), karena Pemerintah Perancis memberi prioritas yang tinggi bagi beasiswa ilmu pengetahuan dan teknologi (*bourses prioritaires*). Bidang-bidang studi akademis lainnya yang terbuka bagi masyarakat Indonesia adalah ilmu kedokteran, ilmu manajemen dan administrasi negara.

Pada 1982 Pemerintah Indonesia mengirim 34 lulusan dari Universitas Sumatera Utara dan Universitas Hasanuddin untuk studi-studi gelar dan pada 1984 sekitar 42 lulusan lebih dari Sumatera Utara belajar di Perancis. Pemerintah Perancis juga memberikan sekitar 100 "bourses prioritaires" tambahan bagi studi gelar doktor dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada tingkat yang lebih operasional PT Nurtanio bekerjasama dengan FIAS (Formation Internationale d'Aeronautique et Spatiale) untuk melatih lulusan sekolah menengah dan pra-sarjana ITB di Perancis untuk menjadi "techniciens" dan "techniciens superieures." Perancis juga terlibat dalam pembentukan dan pengembangan sekolah politeknik Indonesia untuk aeronautika. Pilihan model Perancis disengaja untuk dua alasan: teknik-teknik lobbying FIAS dan, yang lebih penting, lembaga-lembaga politeknik Perancis menyediakan kursus-kursus yang seimbang dalam teori dan praktik aeronautika.

Namun hanya dalam beberapa hal pelajar-pelajar Perancis belajar di In-

donesia atau ahli-ahli Perancis bekerja di sini sehingga menunjukkan betapa tidak berimbangnya hubungan Indonesia-Perancis yang sebenarnya. Tetapi gejala ini merupakan akibat yang wajar dari interaksi antara dua sistem kekuatan yang tidak berimbang. Sistem yang lebih kuat selalu unggul dalam persamaan yang tidak seimbang ini. Ini berarti bahwa setiap bentuk kerjasama bilateral antara suatu negara yang lebih kuat, lebih maju, dan suatu negara yang lebih lemah, sedang berkembang, dengan mudah mengakibatkan suatu situasi di mana sistem yang lebih lemah selanjutnya tergantung pada yang lebih kuat. Sebaliknya menonjolnya unsur pendidikan dalam kerjasama Perancis-Indonesia jelas menunjukkan kesadaran akan kebutuhan suatu unsur budaya yang tetap untuk mengurangi ketergantungan sepihak. Namun tekanan utama pada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam program-program pendidikan dan latihan mungkin masih melanggengkan ketergantungan sepihak, karena negara-negara sedang berkembang biasanya memiliki sumber-sumber daya teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat kecil sehingga tidak mampu untuk sama-sama memberi kontribusi bagi proses kolaborasi. Suatu kadar budaya yang lebih tinggi dalam proses bisa membantu menetralisasi hubungan yang tidak seimbang, karena suatu negara yang sedang berkembang dapat memberi sumbangan yang positif dalam menyingskapkan faktor-faktor filosofi dan budaya, konteks dan pertimbangan filosofis dan budaya yang begitu mendasar dalam menyerap nilai-nilai ilmiah dan teknologi negara-negara penerima.

Keluarga Berencana Membangun Kualitas Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat

Sunarto NDARU MURSITO*

Bangsa Indonesia telah bertekad untuk mengelola kependudukannya secara bertanggung jawab supaya dapat menunjang pembangunan serta kesejahteraan nasional. Karenanya peningkatan Program Keluarga Berencana terus-menerus digiatkan untuk mengendalikan jumlah kelahiran, agar perkembangan hasil-hasil pembangunan lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk masih pesat, maka hampir seluruh hasil pembangunan akan diserap oleh pertumbuhan penduduk. Malahan penambahan penduduk baru ini mungkin sekali akan menghambat laju pembangunan itu sendiri.

Dari istilahnya, kiranya jelas bahwa program nasional "Keluarga Berencana" dimaksudkan untuk mengajak warga negara Indonesia *merencanakan kehidupan keluarganya* menuju hidup berkeluarga yang *berkualitas, bahagia, dan sejahtera*. Kini diyakini bahwa bukan masanya lagi kehidupan berkeluarga tidak direncanakan, artinya tidak dirancang oleh kebijaksanaan manusia, melainkan terserah pada hukum alam atau hukum sosial dan di biarkan mengikuti kemurahan nasib semata-mata. Hal ini seperti kebiasaan masyarakat yang masih berpandangan bahwa banyak anak merupakan berkat Tuhan atau setiap anak membawa rezekinya sendiri-sendiri.

Dewasa ini semakin disadari bahwa merupakan keluhuran martabat manusia untuk *menguasai* hukum alam dan hukum sosial, termasuk hukum yang mengatur kehidupan berkeluarga, demi kepentingan *penyempurnaan* dan *kesejahteraan* pribadi-pribadi manusia. Kebijaksanaan akal budi dan penerangan hati nurani mengamanatkan supaya setiap keluarga yang didirikan dipertanggungjawabkan untuk penyempurnaan dan kesejahteraan *anggotanya dan masyarakat keseluruhan*. Karenanya hidup berkeluarga yang

*Staf CSIS.

direncanakan ini sewajarnya diusahakan untuk menjadi anjuran sosial dan pola budaya bagi masyarakat kita.

Sudah pasti pembangunan keluarga berencana ini terutama dihadapi oleh *pemuda-pemudi* yang memasuki jenjang pernikahan. Mereka relatif belum matang, dan keluarga muda adalah pasangan usia subur yang potensial untuk melahirkan banyak anak, sehingga mudah menimbulkan masalah sosial dan ekonomi bagi keluarganya maupun masyarakat. Kaum muda sangat membutuhkan kebijaksanaan dan pengalaman, terutama dari generasi lebih tua yang telah menjalani kehidupan berkeluarga itu sendiri. Baik sekali kalau dalam semangat dan suasana kekeluargaan generasi lebih tua maupun generasi muda *berdialog secara saling menghormati* dan bukan monolog mengenai kehidupan keluarga-keluarga yang dibangun seterusnya, supaya generasi muda mencontoh dan mengembangkan aspek-aspek yang baik dari keluarga generasi lebih tua dan memperbaiki kekurangan atau celanya.

Keberhasilan program Keluarga Berencana sebenarnya bukan hanya ditentukan oleh faktor sosial dan ekonomi, melainkan juga oleh berbagai faktor yang lain, khususnya faktor rohani atau manusiawi yang dewasa ini cenderung semakin mengalami erosi ataupun pendangkalan. Bagaimanapun semakin lengkap dan menyeluruh faktor-faktor yang diperhitungkan, niscaya semakin mantaplah pembangunan keluarga berencana itu. Ini sesuai dengan orientasi nasional menuju pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya.

KELUARGA BERENCANA MERANCANG KELUARGA BAHAGIA DAN SEJAHTERA

Kualitas dan kesejahteraan warga negara maupun bangsa pada dasarnya *sangat tergantung* pada kualitas dan kesejahteraan hidup *keluarga-keluarga*. Bagaimanapun juga para warga negara berasal ataupun hidup dari keluarga maupun bangsa yang pada umumnya merupakan himpunan orang-orang yang berkeluarga.

Oleh karena itu, sudah selayaknya pemerintah dan masyarakat semakin giat megalakkan program keluarga berencana untuk *terus-menerus meningkatkan* mutu hidup dan kesejahteraan keluarga-keluarga di Indonesia baik lahiriah maupun batiniah. Pada tahap sekarang program itu dirumuskan dengan cita-cita orientasi pada norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS). NKKBS ini dilaksanakan dengan secara bertanggung jawab membatasi jumlah anak, menjarangkan kelahiran anak, dan menganjurkan umur 20-35 tahun sebagai usia yang optimal untuk mengandung dan melahirkan anak-anak. Dari terwujudnya NKKBS ini diharapkan kehidupan keluarga bisa *lebih terjamin* dari segi ekonomi, kesehatan, sosial, dan kepribadian.

Merancang Kesejahteraan Keluarga

Secara ekonomi orang tua yang melahirkan dan membesarkan sedikit anak akan lebih mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya daripada kalau mereka mempunyai banyak anak. Keluarga kecil dapat memberikan bagian yang lebih besar dari penghasilannya untuk membiayai kebutuhan pangan bergizi, perumahan sehat, pakaian dan rekreasi yang pantas, kesehatan dan pendidikan bagi setiap anggotanya daripada keluarga besar. Hal ini terutama berlaku untuk keluarga-keluarga yang pendapatannya tidak berkepastian atau yang pendapatannya setiap bulan tidak banyak.

Lebih lanjut, pemenuhan kebutuhan pangan bergizi dan perumahan sehat itu pasti lebih menunjang tingkat kesehatan para anggota keluarga. Khususnya pembatasan kelahiran anak akan lebih menjamin kesehatan ibu maupun bayi yang dikandung serta disusunya. Sebaliknya ibu yang sering melahirkan, apalagi dengan jarak waktu terlalu pendek, umumnya menyebabkan kesehatannya sendiri ataupun bayinya lemah, sehingga tidak jarang mudah sakit-sakitan. Tentu saja keluarga kecil yang lebih berkecukupan kebutuhan jasmaninya, terpenuhi kebutuhannya berekreasi khususnya olahraga, dan lebih tinggi tingkat pendidikan atau pengetahuan umumnya jelas berpengaruh banyak atas kesehatan anggota keluarganya. Padahal, kesehatan ini merupakan faktor yang penting sekali, sebab tak mungkin seseorang dan keluarganya merasa sejahtera, jika kesehatannya selalu terganggu.

Dari segi sosial kehidupan keluarga besar cenderung lebih semrawut. Banyaknya anggota keluarga, terlebih-lebih dalam tingkat perekonomian rendah, biasanya memunculkan lebih banyak masalah. Akibatnya, banyak permasalahan dari yang kecil sampai yang besar dapat menimbulkan *pertengkaran dan pertentangan* di antara anggota keluarga. Keadaan semacam ini jauh berkurang dalam keluarga kecil. Terutama dalam keluarga kecil tersedia lebih banyak waktu dan dana bagi ayah, ibu, maupun anak-anak untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan, menyumbangkan kemampuan di berbagai bidang, dan meningkatkan produktivitas kerja.

Berkenaan dengan aspek kepribadian dalam keluarga kecil, anggota-anggotanya jelas lebih dimungkinkan untuk memberikan *banyak perhatian satu sama lain*. Andaikata diwujudkan betul-betul, saling perhatian ini pasti menjadi tanah yang subur untuk berkembangnya cinta kasih atau rasa kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Khususnya kemampuan keluarga untuk memberikan pendidikan maksimal (formal ataupun informal) memudahkan para anggota keluarga mengembangkan berbagai potensi pribadinya secara optimal. Dengan demikian dalam keluarga kecil sebenarnya disiapkan agar mutu kehidupan lahiriah diimbangi juga oleh pengembangan bakat kerohanianya.

Merancang Kebahagiaan Keluarga

Selain kesemuanya itu, terutama perlu dihayati pentingnya aspek *moral* dan *religi* bagi pembinaan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Aspek moral dalam kehidupan keluarga menyangkut sikap dan tingkah laku anggota-anggota keluarga. Sebagai dasar yang kuat untuk perilaku moral dalam memasuki hidup perkawinan adalah *cinta timbal-balik* antara calon suami-istri. Namun cinta dalam perkawinan yang semula lebih bersifat *psikologis* masih perlu dikembangkan agar menjadi cinta yang juga bersifat *moral*. Artinya, cinta asmara antara suami dan istri diusahakan menjadi cinta kasih yang *tanpa pamrih egoistik* dan sampai *rela berkorban*. Hal ini pasti bertentangan dengan cinta asmara yang berkembang menjadi cinta diri yang egois, seperti yang seringkali kita jumpai.

Jika cinta perkawinan dapat benar-benar berkembang menjadi cinta kasih moral keluarga, maka sebagai anggota keluarga seseorang akan mengusahakan dan mengembangkan *sikap dan tingkah laku yang terbaik* terhadap se-sama anggota keluarganya. Sudah barang tentu ia tidak lepas dari kekeliruan atau kekurangan, tetapi ia akan memperbaiki diri bila disadarkan.

Aspek religi secara khusus mempunyai pengaruh sangat besar pada moral manusia. Maka orang yang menganut kepercayaan kepada Tuhan sewajarnya *semakin memperdalam* pengetahuan dan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Akhirnya ia akan berkeyakinan bahwa Tuhan itu *Maha Sempurna dan Maha Baik* yang pantas diabdi dan diteladan. Usaha untuk meneladan kebaikan Tuhan dalam sikap dan tingkah laku ini niscaya membuat orang mempunyai *hati baik* juga, yang *memperkuatnya* dalam peri kehidupan membina cinta kasih moral keluarga seperti diuraikan di atas. Apabila suami-istri mau mengembangkan cinta kasih tanpa pamrih dan rela berkorban, maka anak-anak mereka pasti dibesarkan dalam suasana itu sehingga *siap untuk melaksanakannya* juga.

Perlu ditekankan bahwa aspek moral dan religi merupakan faktor yang paling menentukan bagi kebahagiaan hidup dalam keluarga. Bisa saja suatu keluarga tergolong miskin, tak berpendidikan, dan tak terpandang, tetapi bisa benar-benar berbahagia karena mengamalkan moral dan religi secara optimal. Sebaliknya suatu keluarga yang dalam hal materi amat sejahtera tetapi kehidupan moralnya rendah dan sama sekali tak beriman biasanya mengalami kehidupan hampa dan kurang merasa bahagia. Maka dalam keluarga kecil di mana tingkat kedewasaan suami-istri sudah memadai, memang diharapkan adanya waktu, dana, dan kesediaan hati bagi *pembinaan moral dan religi* para anggotanya.

Oleh sebab itu betul-betul merupakan suatu kekurangan hakiki, jika keluarga berencana tidak atau kurang dilandasi pembinaan moral dan religi

pada anggota-anggotanya. Karena bagaimanapun juga jikalau *terlatih* untuk berbuat (moral) baik dalam keluarga, pastilah orang akan *mudah dan pandai* berbuat baik dalam masyarakat. Sebaliknya jika *terlatih* berbuat tidak baik dalam keluarga, niscaya orang mudah dan pandai pula berbuat yang tidak baik dalam masyarakat. Dengan demikian kehidupan keluarga-keluarga dapat berperanan besar untuk membina *tenaga-tenaga pembangunan* bagi masyarakat.

Kebahagiaan dan Kesejahteraan dalam Keluarga Berencana

Biasanya hidup manusia dikatakan sebagai kesatuan dari badan dan jiwa. Tetapi kesatuan badan dan jiwa ini sebenarnya begitu *padu secara menyeluruh*, sehingga masing-masing tidak bisa dipisahkan tanpa sama-sama meniadakan yang lain. Hidup manusia pada hakikatnya mempunyai keluasan dari ujung lahiriah sampai dengan ujung batiniah atau mempunyai kedalaman dari ujung jasmaniah sampai dengan ujung rohaniah. Dari keseluruhannya terbentanglah aspek-aspek yang seharusnya dikembangkan dan perlu dipenuhi kebutuhannya secara *serasi dan seimbang* untuk mewujudkan atau mendapatkan nilai-nilai dari yang paling jasmaniah sampai yang paling rohaniah.

Atas dasar keterpaduan aspek-aspek jasmaniah-rohaniah itu, dapat dipandang konsep "kesejahteraan" dan "kebahagiaan" sebagai sama-sama mengartikan satu kenyataan terpenuhinya kebutuhan hidup manusia sebagai pribadi. Kebahagiaan dan keséjahteraan dimengerti sebagai konsep yang saling memuat. Bisa dikatakan *kebahagiaan* itu menyenangkan diri manusia tetapi dimulai dari inti terdalam rohani/batinnya sampai bidang paling lahiriah/jasmaniahnya, sedangkan *kesejahteraan* itu menyenangkan diri manusia mulai dari bidang paling jasmaniah/lahiriahnya sampai kedalaman rohani/batinnya.

Maka pentinglah, bahwa program keluarga berencana harus menyangkut kebahagiaan maupun kesejahteraan dalam keluarga, tanpa melalaikan salah satu sehingga berat sebelah. Kesejahteraan dipenuhi dengan terjaminnya kebutuhan jasmani seperti sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan; sedangkan kebahagiaan dipenuhi dengan terjaminnya kebutuhan rohani seperti pendidikan, rasa aman, kesenian, cinta kasih, moral, dan Ketuhanan. Di sini kebutuhan jasmani tidak dimaksudkan sebagai jasmani murni, yang tidak mengandung unsur rohani, sebab dalam kehidupan manusia tidak ada kenyataan yang sama sekali jasmani atau juga sebaliknya sama sekali rohani. Perwujudan kebutuhan pangan misalnya mengimplikasi kerohanian juga, dan perwujudan kebutuhan sosial pun mengimplikasi sarana jasmaniah.

Apabila kebutuhan akan nilai-nilai jasmani dan rohani itu tidak terpenuhi atau kekurangan, maka orang menderita kemiskinan: entah itu kemiskinan

material atau kemiskinan spiritual. Dalam hal ini pengejaran kesejahteraan sebenarnya *lebih mantap bila saling melengkapi dan menunjang* dengan pengejaran kebahagiaan. Oleh sebab itu, kebutuhan manusia seharusnya diperlukan dari arah kebahagiaan maupun dari arah kesejahteraan. Bagaimanapun seseorang atau keluarga tidak akan mengalami kebahagiaan *sepenuhnya*, kalau tidak mendapatkan kesejahteraan juga. Begitupun sebaliknya, seseorang atau keluarga tidak akan mengalami kesejahteraan sepenuhnya, kalau tidak mendapatkan kebahagiaan.

Namun di antara berbagai bidang jasmani-rohani itu terdapatlah gradasi (pertingkatan) nilai. Dalam keadaan keharusan yang tak terelakkan untuk memilih salah satu, maka nilai rohaniah harus diprioritaskan. Nilai rohaniah menduduki urutan tertinggi dalam perangkat nilai-nilai, karena pada lingkup rohaniah terletak pusat sumber daya manusia dan inti keluhuran martabat manusia. Maka disadari atau tidak, dalam konsep Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera dalam program Keluarga Berencana sekarang ini sungguh tepatlah bahwa kebahagiaan keluarga didahulukan daripada kesejahteraannya.

KEHIDUPAN KELUARGA MENENTUKAN KUALITAS KEPRIBADIAN ANGGOTANYA

Kehidupan berkeluarga pada hakikatnya mau mempersatukan pria dan wanita sepadu dan seerat mungkin, kemudian juga mempersatukan mereka sebagai ayah dan ibu dengan anak-anak mereka. Ini berarti bahwa "hubungan antar pribadi" dalam kehidupan berkeluarga merupakan faktor yang mendasar untuk pembangunan keluarga. Apabila hubungan antar pribadi dapat terbina secara benar, maka kehidupan keluarga akan berkembang mantap mencapai kualitas tinggi dan mampu mengembangkan kepribadian manusia. Sebaliknya bila hubungan antar pribadi berlangsung jelek, maka kehidupan keluarga mudah terpecah berantakan dan menghasilkan kepribadian yang tidak beres (*salah-jadi*).

Perwujudan hubungan pribadi dalam keluarga memang akan mengikuti ciri kodrat manusia, di mana setiap orang sebagai anggota keluarga dikembangkan secara sosial dan secara bebas. Anggota-anggota keluarga sebagai pribadi-pribadi merupakan potensi yang terus-menerus berkembang, yaitu ke arah kesempurnaan kepribadian atau ke arah penyelewengan kepribadian. Kualitas perkembangan ini terutama ditentukan oleh kebebasan/pilihannya sendiri dan isi pergaulannya dengan orang-orang lain, khususnya isi pergaulannya dengan anggota keluarganya sendiri. Sudah barang tentu program Keluarga Berencana diharapkan dapat membangun kehidupan berkeluarga yang *efektif* untuk mengembangkan kesempurnaan pribadi anggota-anggota keluarga sepenuhnya.

Perkembangan kesempurnaan pribadi ini adalah dalam rangka keberhasilan mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan, tujuan hidup setiap manusia. Semakin sempurna perkembangan potensi-potensi pribadi semakin memudahkan seseorang untuk mengusahakan kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kalau Keluarga Berencana dimaksudkan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka pelaksanaannya pun perlu mengupayakan hidup berkeluarga yang mampu melancarkan perkembangan pribadi yang *selengkap-lengkapnya dan sepenuh-penuhnya* dari anggota-anggotanya.

Berbagai bakat kemanusiaan baik yang jasmani maupun yang rohani hendaknya dikembangkan secara seimbang, sehingga Keluarga Berencana sungguh-sungguh membina pribadi-pribadi yang *kaya jiwa-raganya*. Seringkali kita jumpai kehidupan keluarga justru menempa orang-orang yang hanya kaya secara jasmaniah tetapi miskin secara rohaniah, atau membentuk orang yang indah lahiriahnya tetapi tiada kebaikan hati atau bahkan buruk hatinya. Sudah pastilah semua kualitas kepribadian yang dicapai anggota-anggota keluarga, akhirnya menjadi tanggung jawab *suami dan istri* yang mendirikan persekutuan keluarga itu.

Secara khusus mengenai hasil kepribadian perorangan dalam corak kejiwaannya terutama dapat dipahami dari pemikiran psikologi. Menurut pemikiran psikolog William Schutz¹ hubungan perseorangan dengan orang lainnya itu didorong oleh tiga kebutuhan dasar yang mencakup:

1. kekerabatan (*inclusion*), yaitu orang ingin memasuki dan mempunyai kelompok agar dirinya dikenal, diterima, diakui, dan dimungkinkan berinteraksi;
2. keperanan (*control*), yaitu orang berhubungan dengan orang lain karena ingin berpengaruh, mengatur, dan berperanan;
3. kasih sayang (*affection*), yaitu dalam bergaul dengan orang lain akhirnya orang ingin mencintai dan dicintai, sehingga mengalami rasa kasih sayang.

Teristimewa dalam *kehidupan berkeluarga*lah sewajarnya ketiga kebutuhan dasar manusia itu terjamin pemenuhannya secara terus-menerus. Justru dengan berkeluarga ini seorang pria dan seorang wanita mendambakan menemukan teman hidupnya yang bisa saling bekerjasama dan melengkapi secara menyeluruh dan sedalam-dalamnya, demikian pun antara mereka sebagai ayah dan ibu dengan anak-anaknya. Maka penyadaran akan tiga kebutuhan dasar tersebut memang amat perlu demi pemenuhannya secara op-

¹Dr. M. Sastrapradja, *Catatan Kuliah Filsafat Manusia 1983* (Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara).

timai dalam kehidupan keluarga. Karena apabila hal ini tidak terpenuhi dalam keluarganya, masing-masing anggota keluarga akan mencarinya justru di luar keluarganya, sehingga sedikit demi sedikit akan melemahkan keintiman keluarga atau bahkan meretakkan kebersamaannya. Akibatnya, hidup keluarga ini kehilangan artinya sebagai pembina kemanusiaan yang ideal.

Adapun kadar pemenuhan tiga kebutuhan dasar itu dalam hubungan antar pribadi yang sehari-hari, terutama yang terwujud dalam keluarganya atau kelompok yang paling dekat dengannya, akan membentuk tipe-tipe manusia dengan kepribadian tertentu:

Pertama, dari perkembangan pemenuhan kebutuhan kekerabatan (*inclusion*) dibentuk manusia yang bersifat hipersosial, sosial, atau hipososial.

- a. Kepribadian *hipersosial* bersifat erat secara berlebih-lebihan dengan keluarga/kelompoknya sendiri, sampai tidak mau berpisah sama sekali. Akibatnya, orang ini akan mengabaikan atau melupakan orang-orang di luar kelompoknya karena terlalu mengutamakan kelompoknya sendiri. Manusia tipe ini tidak cocok untuk menjabat kepemimpinan masyarakat sebab sukar diharapkan bisa menjamin kepentingan umum.
- b. Kepribadian *hipososial* sebaliknya bersifat tidak akrab sampai mau terus-menerus menjauhkan diri dari keluarga/kelompoknya. Manusia dengan kepribadian ini sukar diharapkan solidaritas dan partisipasinya dalam kebersamaan masyarakat. Apabila kepribadian hipersosial disebabkan oleh pemenuhan secara berlebihan akan kebutuhan kekerabatan dalam kelompok terbatas, maka kepribadian hipososial justru karena tidak terpenuhinya kebutuhan ini dalam kelompok mana pun.
- c. Kepribadian *sosial* bersifat keselarasan dari kedua ekstrem tadi, yaitu betul-betul bersatu dengan keluarga/kelompoknya tetapi tetap mau terbuka untuk semua orang lain. Sifat ini dihasilkan oleh pemenuhan yang seimbang antara kekerabatan berlebihan dan kekurangan.

Kedua, dari perkembangan pemenuhan kebutuhan keperanan (*control*) dibentuk manusia yang bersifat autokratis, demokratis, atau abdikratis.

- a. Kepribadian *autokratis* bersifat ingin menguasai yang lain tetapi tak mau dikuasai. Manusia yang bersifat demikian ini banyak terbentuk dalam kehidupan keluarga lapisan masyarakat atas, karena terbiasa mempunyai banyak pembantu atau orang bawahan yang selalu siap untuk melaksanakan perintah-perintahnya.
- b. Kepribadian *abdikratis* sebaliknya bersifat takut memimpin dan maunya dikuasai atau dibimbing terus-menerus, bahkan sukar berperan kalau tidak dipimpin dengan pengarahan yang terperinci. Kepribadian kurang berini-

siatif ini disebabkan oleh tidak ditampilkan dan dipupuknya kebebasan perorangan, sehingga bisanya hanya "manut" yaitu mengikuti dari belakang saja sebagai abdi atau bahkan budak. Tipe manusia ini biasanya berkembang subur dalam kehidupan masyarakat lapisan bawah, yang keperanannya tak sempat tumbuh karena hidupnya secara rutin dibebani kesusahan memenuhi kebutuhan primer semata-mata.

c. Kepribadian *demokratis* sebagai keseimbangan dari dua tipe yang berada sebelah di atas, bersifat memandang semua orang sebagai sesama, mau menghargai kemampuan sendiri dan kemampuan orang lain. Maka dalam berperilaku kepribadian ini ingin menempatkan segalanya demi kebaikannya bagi semua.

Ketiga, dari perkembangan pemenuhan kebutuhan kasih sayang (*affection*) dihasilkan kemungkinan kepribadian manusia yang bersifat *hiperpersonal*, *personal*, atau *hipopersonal*.

- a. Kepribadian *hiperpersonal* bersifat terlalu tinggi membawa diri, merasa diri lebih tinggi daripada kenyataannya, angkuh terhadap orang lain, dan menggampangkan segala sesuatu. Tipe kepribadian ini terbentuk dari kehidupan yang serba enak, lingkungan yang terlalu menyayang dan sangat memanjakannya.
- b. Kepribadian *hipopersonal* sebaliknya bersifat rendah diri, merasa tidak layak dan sebagai tak mempunyai arti, berpandangan pesimis. Tipe kepribadian ini dibentuk oleh kehidupan yang terlalu keras, lingkungan yang sangat menekan dan langka kasih sayang.
- c. Kepribadian *personal* adalah sifat pembawaan diri yang wajar dan mandiri berkepribadian. Tipe kepribadian ini terbentuk dari kehidupan yang mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang tepat.

Berbagai tipe kepribadian di atas jelas merupakan iempaan pendidikan terus-menerus yang terutama dihasilkan dalam kehidupan keluarga, khususnya oleh peranan suami-istri sebagai penanggung jawab utama pembangunan keluarga. Seberapa jauh kekayaan kesadaran dan penghayatan kemanusiaan mereka akan tercermin dalam pemenuhan anggota-anggota keluarganya akan kebutuhan dasar manusiawi: kekerabatan, keperanan, dan kasih sayang.

Kehidupan berkeluarga yang memungkinkan anggota-anggotanya melaksanakan hubungan antar pribadi yang saling mengenal, menerima, mengakui, dan berinteraksi terus-menerus akan membina anggota-anggotanya berkepribadian sosial. Sementara itu, kehidupan keluarga yang senantiasa mengusahakan agar pribadi-pribadi anggotanya dapat berperan, yaitu ditampilkan dan dipupuk kebebasan/kediriannya yang bertanggung jawab, akan mendidik kepribadian yang demokratis. Dan keluarga yang mewujudkan kehidupan

sehari-hari dalam suasana kasih sayang yang bisa rela berkorban dan tanpa pamrih egois, mampu membangun insan-insan berpembawaan wajar dan mandiri berkepribadian.

Maka Keluarga Berencana pun hendaknya sehari-hari membudidayakan *kualitas hubungan antar pribadi* sedemikian itu dalam kehidupan keluarganya, supaya menyuburkan terbentuknya sifat-sifat kemanusiaan yang berkepribadian mantap, sosial, dan demokratis. Kalau sebaliknya dalam kehidupannya sehari-hari Keluarga Berencana sampai terpenuhi hubungan antar pribadi yang tidak akrab, saling acuh tak acuh, terbiasa dengan saling kecurigaan atau ketegangan, bahkan diwarnai saling kelalaian atau kebencian, maka akan berakibat berkembangnya kepribadian yang tak beres dan salah arah di atas bukan hanya pada anak-anak melainkan juga pada suami dan istri itu sendiri.

KELUARGA BERENCANA MEMBANGUN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Keluarga Berencana yang memprogramkan NKKBS niscayalah berakibat langsung pada pengendalian jumlah penduduk secara nasional. Berkurangnya laju pertumbuhan penduduk karena penciptaan keluarga-keluarga kecil memungkinkan pemerintah untuk tidak dibebani mencurahkan perhatian dan daya-upaya banyak pada peningkatan kuantitas dari pemenuhan kebutuhan hidup penduduknya. Dengan ini perhatian dan daya-upaya bahkan bisa dialihkan pada peningkatan secara optimal kualitas dari pemenuhan kebutuhan hidup itu. Khususnya pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan persentase kependudukan lebih besar pada *manusia muda* yang justru bersifat konsumtif, sehingga produktivitas bangsa dan keluarga kebanyakan dihabiskan untuk kepentingan konsumsi daripada keperluan investasi demi pembangunan hari depan yang lebih cerah.

Hal itu jelas sangat berarti bagi negara kita yang masih negara berkembang. Dalam kondisi dunia atau masyarakat yang tak berkeadilan sosial dewasa ini setiap bangsa dan juga masing-masing keluarga ditantang untuk menegakkan serta meningkatkan *martabat dan kemandiriannya* di tengah-tengah persaingan perkembangan yang cenderung *semakin memperlebar* kesenjangan sosial. Apalagi pertumbuhan penduduk yang pesat di samping cenderung memperbanyak dan meruwetkan masalah-masalah sosial, juga semakin memperberat beban ekologis pada daya dukung yang terbatas dari kelestarian alam tanah air kita.

Tujuan keluarga kecil untuk mencapai kesejahteraannya yang lebih berdaya/mampu mengusahakan kebutuhan ekonomi, kesehatan, keterlibatan

sosial, penyempurnaan berbagai bakat pribadi manusia memang baru mantap dan utuh jika *sekaligus sekuat tenaga mengembangkan kebahagiaan* tiap anggotanya. Kebahagiaan ini bersumberkan sikap dan perilaku di dalam keluarga saling berbaik hati, bertanggung jawab, rela berkorban, dan berhubungan akrab yang diperkuat oleh keyakinan Ketuhanan dengan cita-cita luhur, budi utama, nurani suci, dan semangat mulia. Pola keluarga demikian dapat menghasilkan warga-warga yang tidak menyusahkan masyarakat, sebaliknya justru menyumbang kemajuan masyarakat dalam hal pembangunan ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, hidup moral, dan Ketuhanan.

Kesejahteraan masyarakat memang sangat tergantung pada kualitas keluarga-keluarga yang akhir-akhir ini giat dilancarkan pembinaannya melalui perancangan keluarga-keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Kesejahteraan masyarakat ini berupa kesejahteraan umum menyeluruh yang terbangun dari dharma bakti ataupun partisipasi positif anggota-anggota keluarga sebagai warga masyarakat. Jelaslah tersedianya serta perkembangan berbagai barang dan jasa kebutuhan hidup ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat pada umumnya sebanding dengan sejauh mana keperanan keluarga-keluarga keseluruhan secara nasional.

Kecukupan dan keseimbangan kebutuhan hidup yang mewujudkan kesejahteraan umum menyeluruh dalam masyarakat jelas ditentukan oleh tingkat kualitas kemanusiaan keluarga-keluarga. Kiranya kualitas kemanusiaan yang diperkembangkan dalam setiap keluarga merupakan faktor yang mendasar bagi terciptanya masyarakat beradab dan adil sejahtera. Maka sering diungkapkan, bahwa keluarga-keluarga merupakan sendi masyarakat. Kehidupan keluarga-keluarga yang kacau-balau dan menderita akan menghasilkan masyarakat yang lemah sehingga sukar berkembang. Layaklah ditekankan fungsi keluarga-keluarga yang pada hakikatnya menjadi *wadah atau lembaga kodrat untuk pendidikan kemanusiaan*, bukan hanya untuk anak-anak yang dilahirkannya melainkan juga untuk suami-istri yang mengembangkan keluarga itu.

Jelaslah setiap anak secara idealnya harus disiapkan oleh keluarga untuk menjadi matang dalam aspek kemanusiaan, sehingga pada usia dewasa nanti sudah bisa berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Namun secara "long life education" dalam arti luas, suami dan istri pun dalam membina keluarganya niscaya dikembangkan aspek kemanusiaan mereka ke arah kemanusiaan yang semakin kaya atau tetap saja kerdil kemanusiaannya. Hal ini mudah dimengerti sebab kurun waktu kehidupan di dunia bagi semua orang merupakan medan belajar untuk meraih tingkat kesempurnaan kemanusiaan yang setinggi-tingginya. Tugas ini tidak berhenti sewakti manusia muda sudah menjadi orang dewasa dan mendirikan kehiarganya sendiri.

Pendidikan kemanusiaan itu merupakan hal pokok, karena akan menentukan bernilai atau tidaknya peranan setiap potensi lain yang dikembangkan seseorang. Dapat saja seorang sungguh berhasil mencapai kemajuan berprestasi di antara berbagai bakatnya seperti kemampuan dalam olah raga, keterampilan seni, kecakapan kepemimpinan, dan kecerdasan ilmiah tetapi bila tidak dibarengi penyempurnaan kemanusiaan, mudah berakibat lebih pada kerugian atau penderitaan masyarakat lingkungannya dan kemalangan orang itu sendiri. Sebaliknya berbagai potensi mungkin berkembang biasa-biasa saja, tetapi karena diutuhkan oleh pengembangan kemanusiaan secara optimal, justru kehadiran seseorang sangat menguntungkan masyarakat lingkungannya dan membuat orangnya sendiri sangat puas akan hidupnya.

Pendidikan kemanusiaan itu terutama terlaksana melalui *pengalaman, penghayatan, serta pengamalan*, dan tidak cukup hanya dengan sekadar pengajaran atau pendesakan. Adapun hakikat kemanusiaan sendiri pada intinya adalah kesadaran atau kepekaan dan "patrap" (bahasa Jawa untuk watak orientatif) yang mengikhtiaran kesejahteraan maupun kebahagiaan bersama, dengan kata lain kepribadian orang yang bertekad untuk memperindah dan meluhurkan kehidupan bersama sebagai manusia. Tentulah perwatakan berkemanusiaan ini baru terbentuk dan dikembangkan dalam masing-masing anggota keluarga, kalau *senantiasa digiatkan pelaksanaannya* dalam kehidupan keluarga yang sehari-hari. Teladan yang dipraktekkan oleh suami-istri dalam perilaku yang nyata dengan sendirinya menjadi pengalaman dan penghayatan anak-anaknya, yang kemudian pasti ditiru, diinternalisasi (dibatinikan), dan diidentifikasi anak-anak dalam pengamalan mereka.

Dalam kehidupan keluarga demikian itu nilai kemanusiaan setiap anggotanya secara dialektis saling memberi pengaruh dan dampak untuk memupuk atau menghambat, menguatkan atau melemahkan, dan menyempurnakan atau memerosotkan kadar kemanusiaan masing-masing anggota keluarga. Pastilah kekayaan kesadaran dan penghayatan kemanusiaan itu terutama tercermin dalam perwujudan perilaku dan hubungan antar pribadi dari anggota-anggota dalam kehidupan *keluarganya sendiri* maupun di tengah-tengah *warga masyarakat luas*. Sebagai contoh perilaku yang positif adalah kedisiplinan, dan perilaku yang negatif adalah kurang pengendalian diri. Sementara itu, hubungan pribadi yang positif adalah keramahan yang tulus, dan hubungan pribadi yang negatif adalah berlaku serakah.

Kekayaan kemanusiaan seseorang itu akan terungkap dalam perilaku dan hubungan pribadi yang mengikhtiaran keséjahteraan dan kebahagiaan bersama, memperindah dan meluhurkan kehidupan bersama, oleh karena itu menebarkan rasa simpati dan menumbuhkan keakraban serta kebersamaan. Sebaliknya, kemiskinan orang dalam hal kemanusiaan akan terungkap dalam

perilaku dan hubungan pribadi yang kering, hampa, tak mengikutiarkan ke-sejahteraan serta kebahagiaan bersama dan malahan menghambatnya, bersifat memandulkan atau justru memperburuk kehidupan bersama, oleh karena itu membosankan dan bahkan menebarkan rasa antipati maupun permusuhan.

Berkembangnya pengetahuan tentang kemanusiaan memang penting untuk memperluas kesadaran dan memperkaya penghayatan dalam hal kemanusiaan. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa orang-orang yang tidak memiliki *pengetahuan formal* yang cukup tentang kemanusiaan, pasti miskin dalam hal kesadaran dan pengamalan kemanusiaan. Idealnya kekayaan kemanusiaan diperoleh secara teoretis melalui pengetahuan dan sekaligus secara praktis melalui pengalaman, penghayatan, dan pengamalan. Seringkali orang yang sederhana dan kurang berpendidikan formal justru jauh lebih kaya dalam hal kemanusiaan daripada orang yang terpelajar secara formal. Hal ini menegaskan bahwa kekayaan kemanusiaan *lebih terhimpun dalam jiwa orang* karena pengalaman, penghayatan, dan pengamalan daripada melalui pengetahuan teoretis tanpa praktik.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan kalau suami-istri yang sederhana dan kurang berpendidikan formal dapat mendidik anak-anak menjadi warga yang jauh lebih bermutu untuk pembangunan masyarakat. Sebaliknya, suami-istri berkedudukan sosial dan berpendidikan formal tinggi malahan menghasilkan anak-anak sebagai warga benalu atau perusak masyarakat. Keluarga terpelajar ini mempunyai kemungkinan lebih untuk menjelaskan dan membekali pada anak-anaknya dalam hal pengetahuan kemanusiaan tetapi tidak didukung oleh pengalaman, penghayatan, dan pengamalan anak-anak dalam keluarganya. Sebaliknya suami-istri sederhana dan tak terpelajar yang kurang mampu menjelaskan dan membekali pengetahuan kemanusiaan mampu mengamalkan kemanusiaan itu dalam rumah tangganya, sehingga dapat dialami, dihayati, dan diamalkan juga oleh anak-anak mereka.

Pembangunan nasional sudah diamanatkan oleh GBHN untuk membangun manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Maka jelaslah Keluarga Berencana mempunyai sumbangan besar bagi pelaksanaan amanah tersebut. Untuk itu sewajarnya secara sistematis Keluarga Berencana diusahakan mengembangkan berbagai potensi pribadi anggotanya supaya tercipta kepribadian yang kaya jiwa-raganya dilandasi penyempurnaan kemanusiaan. Secara ini tercapainya keseluruhan kualitas manusia nanti tidak hanya terhenti pada kepentingan diri sendiri atau kelompok terbatas, melainkan juga mencapai keseluruhan kualitas manusia yang sejati dan maksimal karena memancarkan kesejahteraan ataupun kebahagiaan bersama dalam masyarakat yang seluas-luasnya. Pengembangan keluarga memang harus direncanakan

demikian, sebab pelalaianya bisa mengembangkan kehidupan keluarga yang menyelewengkan kepribadian anggotanya dan akibatnya ia tidak berguna tetapi malahan menyusahkan bagi masyarakat lingkungannya.

Karena keluarga menjadi pendidik pribadi-pribadi yang sehat perkembangannya atau pribadi-pribadi yang tak beres, niscaya masyarakat yang akan menerima akibatnya, yaitu beruntung memperoleh warga-warga yang berguna untuk kebaikan masyarakat lebih lanjut atau hanya menanggung beban dari warga yang tidak menyumbang apa-apa, bahkan mungkin masyarakat justru diancam kelestariannya oleh kehadiran warga-warganya yang merusak. Bagaimanapun juga kehidupan keluarga sungguh berperanan mendasar untuk kemajuan masyarakat, karena dari hidup berkeluarga ditempa jenis-jenis kepribadian, yang nanti masyarakat tinggal cukup mudah mengembangkannya atau sebaliknya tetap sangat sulit memperbaikinya.

Jelaslah masyarakat kita membutuhkan warga-warga yang demokratis, sosial, dan mandiri berkepribadian, sebab hanya orang-orang macam inilah yang bisa diandalkan untuk menunjang dan menggiatkan pembangunan masyarakat, baik untuk masa sekarang (sumber daya suami-istri) maupun untuk masa mendatang (sumber daya anak-anak). Penyumbang dan sumber utama untuk tenaga-tenaga pembangunan demikian adalah kehidupan keluarga-keluarga. Oleh karena itu, masyarakat sebagai keseluruhan perlu merasa *berkepentingan* dan *memberi perhatian* besar pada pembinaan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup keluarga; sebab apabila hidup keluarga berkembang sehat, maka masyarakat pun akan mantap. Sebaliknya bila keutuhan kehidupan keluarga terpecah, maka masyarakat akan goyah.

Komunikasi dalam Proses Kesatuan dan Persatuan Bangsa

Medelina KUSHARWANTI*

PENDAHULUAN

Apabila suatu masyarakat dibuatkan jalan-jalan baru, diberi surat kabar, radio, teater-teater atau buku-buku pada waktunya tampaklah akibat-akibat yang besar. Perubahan timbul dalam cara berpikir orang banyak dan pada apa yang mereka hargai.¹ Alinea ini sebenarnya hanya hendak menunjukkan bahwa sarana-sarana komunikasi memiliki "daya yang cukup ampuh" di dalam mendatangkan perubahan-perubahan pada masyarakat, melalui pesan-pesan yang disampaikan. Baik perubahan pola pikir maupun tingkah laku. Alat-alat tersebut mampu menawarkan dan memperkenalkan ide-ide baru beserta keuntungan-keuntungannya. Lewat radio para petani diperkenalkan kepada metode pertanian modern yang akan memberikan hasil lebih memuaskan dibandingkan dengan metode pertanian tradisional yang selama ini dikenal. Terdorong keinginan memperoleh hasil yang lebih baik, para petani kemudian mengganti cara-cara bertani mereka dengan cara modern seperti yang diperkenalkan lewat radio. Melalui layar televisi masyarakat dapat diajak mengagumi budaya suatu suku yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal. Dari rasa kagum tersebut lama-kelamaan akan timbul rasa memiliki dan sekaligus menimbulkan rasa cinta terhadap budaya yang ditampilkan.

Sistem komunikasi yang demikian memungkinkan terjadinya koordinasi dari kesatuan-kesatuan geografis yang luas. Menyebarluaskan kesadaran akan aspek-aspek kehidupan yang tidak merupakan bagian dari pengalaman pembaca, pendengar atau pirsawan. Kemajuan-kemajuan di bidang komunikasi

*Staf CSIS.

¹Ithiel de Sola Pool, "Komunikasi dan Pembangunan," di dalam Myron Weiner (ed.), *Modernisasi Dinamika Pertumbuhan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1980, hal. 45

telah mengubah konstelasi masyarakat menjadi suatu kesatuan organik yang hidup dinamis. Keadaan yang terjadi di suatu tempat akan berpengaruh di tempat lain pada waktu yang hampir bersamaan, ide yang berkembang di suatu tempat akan dapat dengan cepat dijalankan ke tempat lain sesuai dengan yang dikehendaki. Keadaan demikian berlaku di Indonesia, ide-ide atau pesan-pesan pemerintah dapat disebarluaskan ke seluruh rakyat di tanah air melalui sarana-sarana komunikasi untuk mendapatkan perubahan atau menciptakan keadaan yang diinginkan. Termasuk di dalamnya penyebaran ide dan pesan pemerintah untuk mewujudkan kesatuan persatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tulisan ini bertujuan membahas sejauh mana komunikasi yang telah dibangun pemerintah mampu menyampaikan pesan-pesannya secara tepat dan mengena kepada masyarakat dalam rangka usaha menciptakan iklim bagi kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembahasan terhadap pembangunan komunikasi pemerintah ini menyangkut pembangunan sarana-sarana komunikasi, teknik-teknik penyampaian pesan dan yang paling pokok adalah bagaimana pemerintah membentuk pesan-pesannya, sehingga pesan-pesan tersebut mampu menumbuhkan motivasi, mengubah pola pikir atau tingkah laku masyarakat seperti yang diharapkan.

PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Ada pandangan yang beranggapan bahwa bangsa Indonesia lama, mungkin sudah ada sejak jaman pra-sejarah. Dalam masa tertentu terutama dalam masa kerajaan agung Sriwijaya dan Majapahit, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tampak jelas terwujud sebagai suatu kesatuan politik yang besar.² Namun setelah penjajah datang, dengan memecah-belah, mereka berhasil menaklukkan seluruh Kepulauan Indonesia beserta dengan penduduknya guna dijadikan sumber kemakmuran bagi negara asal.

Dimulai dengan pendirian Budi Utomo (1908) benih-benih kesadaran berbangsa dan bernegara mulai ditumbuhkan. Lewat pendidikan mulai ditanamkan kecintaan terhadap bangsa dan tanah tempat lahir. Ide-ide ini disosialisasikan lewat surat-surat kabar yang terbit pada waktu itu. Tahun 1928, jawaban terhadap tantangan usaha pemecahbelahan semakin dipertegas. Kaum muda mencetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan sumpah ini ditetapkan identitas bangsa yang melahirkan bangsa In-

²Lihat, Harsya W. Bachtiar, "Integrasi Nasional Indonesia: Beberapa Catatan," *Analisa*, No. 11, Tahun 1984.

donesia dalam arti etnis dan politis, merupakan wujud kesatuan dan persatuan bangsa, tanah air dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Konsep kesatuan dan persatuan bangsa yang tampak nyata pada tahun 1928 tersebut, ternyata menjadi alat yang berguna bagi pendobrakan belenggu penjajahan di tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan sampai sekarang, gerakan kebangsaan Indonesia semakin ditingkatkan untuk mempersatukan suku-suku bangsa di kepulauan kita menjadi suatu bangsa yang besar. Proses mempersatukan penduduk, budaya serta daerah yang merupakan unsur terpenting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semakin direkatkan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsalah hidup serta sumber hukum bagi seluruh rakyat. Di samping itu strategi pembangunan nasional yang tertuang di dalam GBHN merupakan rangkaian program di segala bidang yang memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dan dioperasikan melalui tahapan-tahapan Pembangunan Lima Tahun. Perangkat-perangkat tersebut dipakai di dalam pembentukan negara Indonesia yang di dalam melakukan tugasnya menganut aliran pikiran integralistik, maksudnya negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala golongan dan perseorangan serta mempersatukan diri dengan segala lapisannya.³ Pemikiran ini sejalan dengan pendapat Ernest Renan, bahwa pengertian bangsa (nation) adalah solidaritas besar yang terbentuk oleh perasaan yang timbul sebagai akibat-akibat pengorbanan-pengorbanan yang telah diadakan bersama dan kesediaannya untuk melaksanakannya lagi di masa depan, bagi bangsa Indonesia ini berarti pula mencakup kesiadaan untuk mencapai cita-cita bersama yaitu masyarakat adil-makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Dengan demikian kesatuan dan persatuan dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak terbatas hanya berdasarkan pada kesamaan ras, bahasa, agama atau kepentingan serta batas-batas geografis, namun berdasarkan kesamaan yang tumbuh akibat pengorbanan masa lalu, masa kini dan yang akan datang. Hal lain yang mengikat dan mendorong kesatuan dan persatuan bangsa ialah keinginan memenuhi tugas-tugas negara seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga dapatlah dipahami, bahwa usaha membina kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara bukan hanya ditopang oleh kerukunan antar suku, ras, umat beragama serta persatuan geografis belaka, namun perlu ditunjang oleh kemampuan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan keamanan. Kelemahan pada salah satu bidang tersebut, akan merupakan ancaman bagi ke-

³Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Penerbit Siguntang, 1959), hal. 114.

satuan dan persatuan bangsa. Andaikata terdapat kerapuhan dalam bidang ideologi, niscaya negara akan dengan mudah dimasuki berbagai ideologi dan paham asing yang merasuki seluruh masyarakat, yang akhirnya akan menimbulkan berbagai penggolongan dan pengelompokan masyarakat atas dasar ideologi atau paham yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu konsepsi Wawasan Nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial-budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan disertai doktrin Ketahanan Nasional sebagai kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara adalah langkah-langkah untuk memperkuat persatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai perisai menanggulangi usaha-usaha pemecahbelahan. Kebijaksanaan dan strategi yang telah disepakati bersama ini dengan sendirinya harus dipahami oleh seluruh rakyat, sekaligus disertai konsekuensi untuk melaksanakannya. Namun demikian kondisi yang menunjang diterimanya kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut harus dipersiapkan, antara lain dengan sosialisasi konsep-konsep dan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut, agar masyarakat benar-benar dapat menerima dan sekaligus merasa terikat untuk ikut serta melaksanakannya.

KOMUNIKASI SEBAGAI ALAT

Komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat merupakan salah satu alat sosialisasi dan juga cara untuk mendapatkan keadaan yang diharapkan. Kebutuhan ini semakin mendesak, dengan adanya kenyataan-kenyataan yang muncul bahwa selama 40 tahun merdeka, bangsa Indonesia belum mampu mewujudkan semua harapan dan cita-citanya secara penuh. Masih banyak persoalan yang hadir sebagai perintang. Misalnya di dalam negeri sendiri kesatuan dan persatuan yang merupakan kunci pokok dalam tata hidup berbangsa dan bernegara masih terus terancam dengan persoalan-persoalan yang berasal dari pertikaian-pertikaian yang disebabkan perbedaan suku, ras maupun agama. Perbedaan-perbedaan ideologi yang muncul dalam masyarakat sering terasa mengganggu ketenteraman hidup bersama, belum lagi masalah pertambahan penduduk, kepadatan dan penyebarannya, serta kurang memadainya kesempatan kerja yang tidak jarang menimbulkan gejolak dan kerawanan sosial. Masalah ketergantungan dari luar, terutama dari negara-negara maju yang berupa pasaran, impor kapital/teknologi serta konflik-konflik yang diakibatkan oleh teknologi yang memperbesar daya singgung sehingga pertentangan kepentingan tidak dapat diakomodasikan. Persoalan-persoalan ini perlu dipahami oleh masyarakat dengan proporsi yang sebenarnya, lewat informasi-informasi yang jelas dan benar, sehingga dapat diharapkan munculnya peran-serta masyarakat untuk turut memikirkan dan

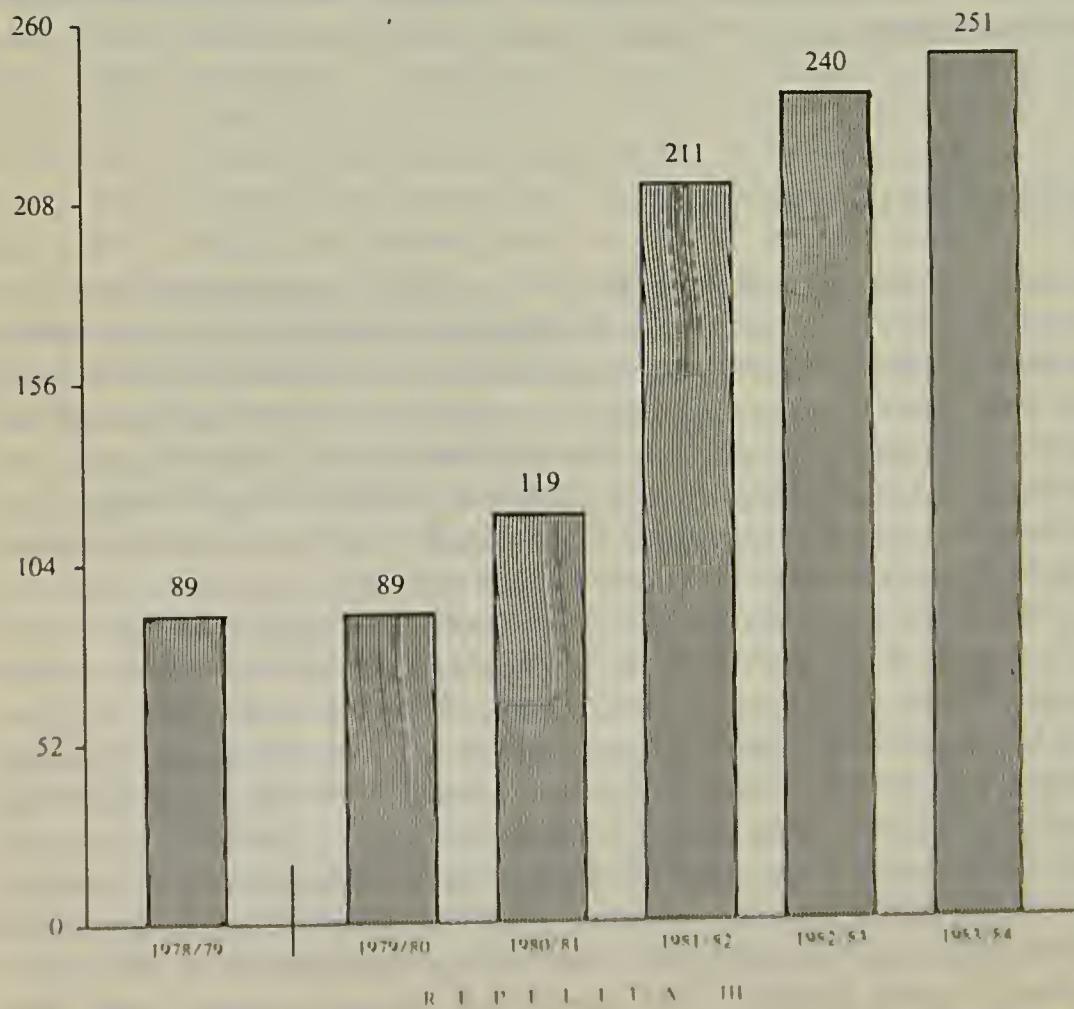
mencari jalan ke luar dan bukannya memperumit permasalahan. Menurut Klaus Knorr, kekuatan nasional meliputi tiga unsur, yaitu motivasi, kemampuan fisik dan pengelolaan. Dengan komunikasi motivasi dapat dibangun, ditingkatkan sebagai sikap mental yang ulet dan tangguh, berlandaskan pada perjuangan dan kesediaan berkorban.

Untuk mendapatkan sikap-sikap yang demikian ini Pemerintah Indonesia berupaya dengan memperbanyak serta mempersering pesan-pesan dalam bentuk informasi-informasi maupun himbauan yang disampaikannya lewat surat kabar, televisi, radio maupun melalui media-media yang lain. Sebagai indikator, jumlah Pusat Penerangan Masyarakat (Puspenmas) ditingkatkan dari

Grafik 1

PERKEMBANGAN JUMLAH PUSPENMAS 1978/1979 - 1983/1984

(buah Puspenmas)



R E P E T U A III

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR
16 Agustus 1984.

89 buah pada tahun 1978/1979, menjadi 251 buah pada tahun 1983/1984. Dengan peningkatan ini diharapkan semakin banyak dan semakin kontinu penyampaian pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Penambahan dan peningkatan juga dilaksanakan pada jam siaran RRI dari 704 jam pada tahun 1978/1979 menjadi 1.442 jam pada tahun 1983/1984. Meskipun alokasi waktu untuk masing-masing bidang acara, tidak banyak mengalami perubahan kecuali pengurangan penyampaian berita dari 29% pada tahun 1978/1979 menjadi 25% pada tahun 1983/1984, dan penambahan pada acara kebudayaan dari 45% untuk periode 1978/1979 menjadi 50% pada periode 1983/1984, tetapi karena jumlah jam siaran secara keseluruhan ditambah, maka dengan sendirinya frekuensi penyiaran tiap-tiap bidang acara meningkat pula (lihat Tabel 1).

Tabel 1

**JUMLAH JAM SIARAN RATA-RATA PER HARI
DARI SELURUH STASIUN PEMACAR RRI
SERTA IMBANGAN JENIS SIARANNYA, 1978/1979 - 1983/1984**

Uraian	1978/79	Repelita III				
		1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
Jumlah jam siaran rata-rata per hari	704	704	706	709	729	1.442
Berita/penerangan	(29%)	(30%)	(25%)	(25%)	(25%)	(25%)
Pendidikan/agama	(19%)	(19%)	(20%)	(20%)	(20%)	(20%)
Kebudayaan/hiburan	(45%)	(44%)	(50%)	(50%)	(50%)	(50%)
Iklan/lain-lain	(7%)	(7%)	(5%)	(5%)	(5%)	(5%)

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR 16 Agustus 1984.

Selain penambahan jumlah Puspenmas serta penambahan jam siaran RRI, maka jam siaran TVRI pun ditingkatkan pula, dari 24.302 jam pada tahun 1978/1979 menjadi 25.970 jam pada tahun 1983/1984. Peningkatan ini hanya sebesar 6,86%, tetapi dengan adanya kebijaksanaan penghapusan siaran iklan di TVRI maka jam siaran untuk bidang penerangan/berita, pendidikan/agama, hiburan/seni budaya dan lain-lain semakin bertambah pula.

Tabel 2

JUMLAH JAM SIARAN SERTA IMBANGAN JENIS SIARAN TVRI,^{*}
1978/1979 - 1983/1984 (dalam jam)

Uraian	1978/79	Repelita III				
		1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
Jam siaran	24.302	24.302	25.719	25.719	25.965	25.970
Berita/penerangan	(22%)	(22%)	(22%)	(28%)	(28%)	(27%)
Pendidikan/agama	(23%)	(23%)	(23%)	(23%)	(23%)	(24%)
Hiburan/seni budaya	(45%)	(45%)	(45%)	(47%)	(47%)	(47%)
Iklan	(8%)	(8%)	(8%)	—	—	—
Lain-lain	(2%)	(2%)	(2%)	(2%)	(2%)	(2%)

* Jumlah jam siaran selama setahun dari seluruh stasiun TVRI.

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR, 16 Agustus 1984.

Dengan pesan-pesan yang semakin dipersering tersebut, maka lewat acara-acara yang disajikan mass media diharapkan tumbuh kondisi yang menunjang munculnya partisipasi masyarakat dalam menghadapi semua problema yang timbul di dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu pesan-pesan lewat media ini juga diarahkan bagi pembentukan sikap-sikap yang diinginkan pemerintah, yakni terpeliharanya keutuhan dan persatuan bangsa, dengan menumbuhkan rasa senasib secita-cita, menumbuhkan solidaritas nasional yang gemanya dapat dirasakan semua orang, serta usaha-usaha menarik partisipasi rakyat terhadap pembangunan dengan penerangan koperasi, penyuluhan pajak dan lain sebagainya. Dengan harapan agar pesan-pesan tersebut memiliki daya jangkau yang lebih luas, merata di seluruh tanah air dan segenap lapisan masyarakat, maka langkah-langkah yang diambil pemerintah adalah menambah jumlah stasiun pemancar dan kekuatan pemancar RRI serta TVRI, di samping program koran masuk desa.

Dari Tabel 3 dan 4 dapat dilihat perkembangan jumlah stasiun dan kekuatan pemancar RRI, penambahan jumlah stasiun pemancar untuk memperluas daya jangkau pesan-pesan pembangunan, disertai pula dengan peningkatan kekuatan pemancar agar pesan atau informasi yang disampaikan dapat diterima dengan terang, jelas dan baik oleh seluruh pendengarnya. Hal tersebut berlaku pula pada TVRI, dengan unit produksi keliling yang mulai

diadakan pada tahun 1981/1982 untuk menunjang perluasan daya jangkau pesan-pesan pemerintah yang disampaikan lewat acara-acara TVRI.

Tabel 3

**PERKEMBANGAN JUMLAH STASIUN DAN KEKUATAN PEMANCAR RRI
1978/79 - 1983/84**

No.	Uraian	1978/79	Repelita III				
			1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
1.	Stasiun penyiaran	49	49	49	49	49	49
2.	Stasiun pemancar	252	253	253	265	300	300
3.	Kekuatan pemancar	2.550	2.560	2.560	2.660	2.747	2.947

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR 16 Agustus 1984.

Tabel 4

**PERKEMBANGAN JUMLAH STUDIO, STASIUN PEMANCAR
DAN PENGHUBUNG TVRI, 1978/79 - 1983/84
(buah stasiun)**

Jenis Stasiun	1978/79	Repelita III				
		1979/80	1980/81	1981/82	1982/83	1983/84
Stasiun penyiaran (studio)	9	9	9	9	9	9
Stasiun pemancar/penghubung	82	104	116	124	186	200
Unit produksi keliling	—	—	—	10	10	10

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR 16 Agustus 1984.

Yang paling menyolok dari kesemuanya ini ialah Program Koran Masuk Desa. Dari Tabel 5 dapat terlihat, bahwa dari 5 propinsi yang dijangkau pada tahun 1978/1979 maka dalam kurun waktu lima tahun semua propinsi telah berhasil dijangkau. Ini menandakan bahwa pesan-pesan ataupun informasi dari pemerintah yang disampaikan kepada segenap masyarakat telah tersebar merata di seluruh tanah air, baik di kota-kota maupun di desa-desa.

Tabel 5

KORAN MASUK DESA, 1978/79 - 1983/84

Tahun	Jumlah Pelaksana Koran Masuk Desa (penerbit)	Jumlah Penerbitan Per Tahun (eksemplar)	Jumlah Daerah yang Dijangkau (propinsi)
1978/79	12	4.500.000	5
1979/80	22	6.000.000	8
1980/81	34	7.150.000	13
1981/82	43	15.652.000	22
1982/83	48	12.480.000	26
1983/84	50	8.675.000	26

Sumber: Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di depan Sidang DPR
16 Agustus 1984.

EFEKTIVITAS PESAN

Dari tabel dan penjelasan dapat diketahui bahwa selama lima tahun pemerintah telah berupaya mengadakan peningkatan sarana komunikasi, baik berupa peningkatan jumlah sarana komunikasi, intensitas komunikasi maupun perluasan daya jangkau komunikasi. Kesemuanya ini diharapkan menjadi perangkat pendukung bagi tercapainya tujuan pemerintah, yakni menyampaikan pesan-pesan termasuk penanaman rasa kesatuan dan persatuan di kalangan masyarakat.

Sekarang setelah perangkat keras dipandang cukup memadai, kiranya diperlukan pula adanya suatu pengkajian apakah komunikasi pemerintah telah dilakukan secara efektif sehingga pesan-pesannya dapat diterima dengan baik dan memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan, apakah partisipasi masyarakat akan meningkat, atau dengan kata lain apakah pesan-pesan tersebut cukup komunikatif. Melalui mass media konsep kesatuan persatuan bangsa memang dapat diajarkan kepada seluruh penduduk di seluruh wilayah tanah air. Namun apakah kemudian masyarakat menerima dan berlaku sesuai dengan nilai yang terkandung dalam konsep tersebut? Untuk melihat seberapa jauh pesan-pesan tersebut mengena sasaran atau tidak, di antaranya dapat dikaji dari opresiasi masyarakat terhadap pesan-pesan yang disampaikan baik melalui surat kabar, TV maupun radio.

Dari suatu penelitian tentang apresiasi masyarakat terhadap isi surat kabar di Indonesia, yang dilakukan oleh Lembaga Pers dan Pendapat Umum Pusat Jakarta tahun 1978/1979, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberitaan surat kabar ibukota yang dijadikan sampel, dilihat dari segi jenisnya lebih banyak didominasi oleh berita-berita politik yang menyangkut Sidang Umum MPR, sedang berita-berita yang menyangkut bidang ekonomi, sosial dan budaya boleh dikatakan sedikit sekali.
2. Pola pemberitaan jalannya Sidang Umum MPR bersifat monoton, sehingga dalam membaca surat kabar yang satu dan beralih ke surat kabar yang lain isinya tetap sama. Ada kesan bahwa semua surat kabar hanya menerima release resmi saja dari pemerintah terutama mengenai pernyataan-pernyataan.
3. Ada kesan bahwa selama Sidang Umum MPR pers lebih berperan sebagai pendukung tanpa reserve, tanpa berani memberikan ulasan atau pendapat yang bersifat mengkritik, walaupun dilakukannya secara konstruktif. Pers dalam menyajikan beritanya terutama dalam bentuk opini lebih mengikuti kehendak pemerintah, tidak berani mengkritik secara langsung dan andai-kata pers ingin mengkritik juga, terutama koran independen atau partai, maka biasanya mereka meminjam pendapat orang lain untuk ditampilkan sebagai fakta di dalam surat kabarnya. Kecuali itu suasana menjelang Sidang Umum MPR kuranglah menguntungkan bagi masyarakat untuk memanfaatkan surat kabar dalam usaha memberikan sumbangan pikiran berupa saran, pendapat atau kritik. Masyarakat pembaca dalam hal ini lebih banyak bersifat pasif atau sekedar mendukung saja apa yang dilakukan oleh pemerintah dan wakil-wakil mereka di DPR/MPR. Pers dalam memberikan partisipasinya perlu mendapatkan kesempatan melaksanakan fungsi kontrolnya. Partisipasi saja tanpa kontrol menjadikan pers kering dan gersang, keduanya harus saling mengisi dan menjalankan fungsinya.⁴

Adapun tanggapan (apresiasi) masyarakat terhadap materi pesan, tujuan dan nilai-nilai yang disiarkan melalui TVRI, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 1978/1979, diperoleh kesimpulan antara lain:

”Bawa isi acara TVRI maupun penyusunannya dalam program-program nampaknya masih terlalu terpusat di Jakarta, tidak mengherankan kalau orang-orang daerah terlalu berorientasi ke Jakarta, kurang tertarik pada masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya sendiri, karena informasi-informasi tentang daerah sendiri sangat kurang.”⁵

Efektivitas pesan yang disampaikan lewat radio kepada masyarakat tercermin dari kesimpulan hasil penelitian tentang efektivitas radio sebagai media

⁴*Himpunan Ringkasan Hasil Penelitian Penerangan 1978-1979, 1979/1980* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan, 1982), hal.20.

⁵*Ibid.*, hal. 37.

penerangan, pendidikan dan hiburan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Afiliasi, Universitas Hasanuddin pada tahun 1978/1979:

"Dibanding dengan radio luar negeri, radio swasta niaga/Pemda, informasi RRI, masih berada pada skala tertinggi dalam memperkenalkan daerah lain di Indonesia. Mempertinggi kesadaran/ketahanan nasional, membantu memperbaiki kehidupan sehari-hari dan memperluas pengetahuan. RRI merupakan wahana pembinaan kesatuan nasional yang sangat berguna, di lain pihak ia juga dirasakan cukup membangkitkan rasa cinta kepada daerah sebab musik/lagu-lagu daerah yang sering disiarkan dapat dihayati oleh penduduk yang bersangkutan."⁶

Dari hasil-hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa pesan-pesan pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat melalui surat kabar dan TVRI belum dapat memuaskan serta belum menjangkau macam pesan atau informasi yang dibutuhkan masyarakat secara penuh, terbukti dengan bermacam ungkapan yang menunjukkan adanya ketidakpuasan, mulai dari kesan terlalu dominannya pesan pemerintah dengan pembatasan atas keinginan mengemukakan pendapat dan kritik di surat kabar, informasi yang terlalu banyak terpusat di Jakarta dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan yang mengandung rasa ketidakpuasan masyarakat tersebut tentu mempunyai sebab-sebab, di dalam masalah ini tentunya dikaitkan dengan komunikasi, inilah yang harus ditemukan untuk menutup kekurangan-kekurangan di dalam penyampaian pesan.

KOMUNIKASI MANUSIAWI

Yang perlu diingat dalam setiap proses komunikasi adalah, bahwa komunikasi bukan hanya menyangkut masalah fisik saja, dalam bentuk sarana, bahasa (lambang), cara retorik, maupun karakteristik sintaksis, namun juga berkaitan dengan masalah psikologis yang terdiri dari unsur-unsur efektivitas komunikasi, analisa isi serta psikologi individual.⁷ Pada dasarnya komunikasi adalah cara untuk menyebarluaskan kemajuan pikir dan tingkah laku, mempermudah usaha mempersatukan pikiran yang berbeda-beda dalam kelompok serta dipakai untuk meningkatkan intelegensi sebagai unsur dari pendidikan. Menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah proses di mana seorang insan (komunikator) menyampaikan perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata) untuk mengubah tingkah laku insan-insan lainnya (komunikasi, sasaran).⁸

⁶*Ibid.*, hal. 46.

⁷Onong, U. Effendy (ed.), *Komunikasi dan Modernisasi* (Bandung: Penerbit Alumni, 1973), hal. 4.

⁸*Ibid.*, hal. 2.

Perubahan tingkah laku ini dapat berupa perubahan sistem nilai-nilai yang mengubah norma yang tidak berfungsi lagi dalam masyarakat, atau dapat pula berupa penanaman nilai-nilai baru yang membawa masyarakat ke arah kemajuan atau pada keadaan yang lebih baik. Kiranya inilah yang merupakan tujuan akhir dan bagian paling penting dari setiap proses komunikasi, yakni tanggapan (response) terhadap pesan-pesan yang telah disampaikan. Pada tingkat pertama tanggapan itu berupa perhatian dan pada tingkat selanjutnya menjadi proses perubahan tingkah laku. Jadi masalah komunikasi erat hubungannya dengan perubahan nilai-nilai dan sikap-sikap, dengan demikian pesan-pesan dalam setiap komunikasi harus terencana agar isinya mengandung nilai-nilai perubahan psikologis dan sosiologis. Dalam pengertian ini, maka dari seluruh unsur komunikasi, unsur pesan dan sasaran mendapat tekanan lebih menonjol,⁹ artinya dalam pembuatannya pesan tersebut diusahakan untuk sanggup menciptakan kondisi atau perubahan yang diinginkan masyarakat yang menjadi sasarannya. Demi mencapai hal ini maka perlu diterapkan model komunikasi yang manusiawi.¹⁰ Di dalam komunikasi ini disertakan analisa tentang orang-orang yang akan menerima pesan, dan hasilnya akan menentukan jenis komunikasi tersebut, yaitu komunikasi yang disesuaikan dengan keadaan sasarannya. Komunikasi manusiawi memandang bahwa masyarakat modern bukanlah masyarakat massa yang tanpa kepribadian, kehilangan norma dan nilai serta bebas dari kelompok-kelompok primer. Komunikasi manusiawi memandang bahwa pesan yang disampaikan juga harus mempunyai hubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pribadi orang-orang yang menjadi sasarannya, serta merupakan suatu usaha mengurangi bentuk-bentuk organisasi yang sifatnya mekanis dan tidak teratur yang tak mampu memindahkan pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan cepat. Dalam pengembangannya bertujuan meningkatkan harkat kemanusiaan, membangun pergaulan hidup yang lebih bersifat kemanusiaan, dengan wujud yang integratif, konsultatif dan terbuka. Suatu komunikasi yang serasi pada dasarnya mencerminkan suatu situasi di mana komunikator dan komunikan mengerti satu sama lain, saling mempengaruhi dan bahwa hasil komunikasi akan memuaskan kedua belah pihak. Berangkat dari pendekatan tersebut maka pesan-pesan yang terkandung dalam setiap komunikasi akan mampu mendatangkan perubahan yang dikehendaki, dengan contoh sederhana diumpamakan terdapat sikap saling curiga antara satu suku dengan yang lain di wilayah tanah air ini, maka setelah pesan-pesan disampaikan baik dalam bentuk penjelasan, pendidikan, bahkan hiburan, diharapkan sikap saling curiga tersebut sedikit demi sedikit terkikis dan berganti dengan munculnya sikap saling menghargai, penuh toleransi serta kemauan untuk hidup bersama dengan damai.

⁹*Ibid.*, hal. 39.

¹⁰*Ibid.*, hal. 34.

Dari pengertian-pengertian komunikasi manusiawi, jelaslah untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang diharapkan segi pembentukan pesan serta pemahaman sasaran amat dipentingkan, sehingga terbentuk pesan yang komunikatif, namun dari apresiasi masyarakat dapat disimpulkan bahwa pesan-pesan disampaikan justru dengan mengabaikan segi-segi tersebut. Masyarakat hanya difungsikan sebagai obyek yang dijadikan sasaran berbagai pesan dan informasi, baik yang diarahkan bagi peningkatan integrasi, partisipasi sukarela, keterkaitan batin antar warga dan lain-lain. Dari apresiasi masyarakat tersebut tampak bahwa pendekatan psikologi individual maupun pendekatan sosio-kultural yang penetratif kurang diperhatikan, sedangkan segi politis dan teknis lebih dominan. Hal ini kelihatan misalnya dengan informasi yang terlalu banyak terpusat di Jakarta secara tidak langsung akan menimbulkan kesan bahwa daerah-daerah lain kurang mendapat perhatian, keadaan ini akan mengakibatkan munculnya keengganan masyarakat untuk ikut mendukung gagasan-gagasan yang dilontarkan pemerintah.

Apabila komunikasi diarahkan untuk menyampaikan pesan-pesan politik, strategi, pertahanan-keamanan yang pada intinya untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan di dalam berbangsa dan bernegara, maka pesan-pesan yang disampaikan harus dapat mempengaruhi pola pikir dengan memakai cara-cara yang halus, artinya tidak terlalu provokatif namun menyentuh kebutuhan masyarakat yang dijadikan sasaran pesan-pesan tersebut, atau untuk membuat agar orang-orang bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki, komunikasi harus diperkuat dengan pendekatan yang bersifat antar pribadi (personal), dengan memperhatikan kebudayaannya, sistem sosial dan kepribadian dari sasaran pesan. Pesan harus disesuaikan dengan sikap moral, lingkungan penerima dan disertai iklim yang menjamin kebebasan mengemukakan pendapat dan kritik membangun yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga terbentuk suatu dialog yang memberikan keseimbangan antara komunikator (pemerintah) dengan komunikan (masyarakat) dan menghasilkan komunikasi yang memuaskan kedua belah pihak sehingga akhirnya pesan-pesan yang disampaikan pemerintah tersebut diterima masyarakat berdasarkan kesadaran dan bukan atas dasar paksaan, dengan demikian pengendapan pesan-pesan tersebut akan mendorong munculnya perubahan tingkah laku (pola pikir) sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam pesan-pesan tersebut. Untuk mencapai hasil yang memuaskan diperlukan pula pertemuan pendapat antara masyarakat dan pemerintah yang dicapai baik dalam tulisan di mass media maupun lewat lembaga-lembaga negara.

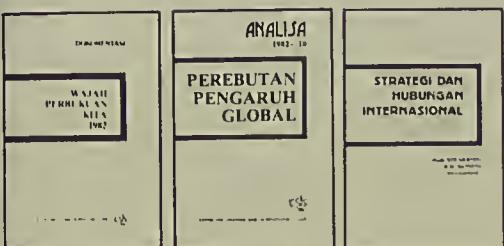
Perhatian yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat sebagai pesan telah ditunjukkan oleh RRI di dalam menyampaikan pesan-pesannya, ini terbukti dengan hasil penelitian tentang apresiasi masya-

rakat terhadap siaran RRI memberikan hasil yang positif. Pesan-pesan yang disampaikan disesuaikan dengan kondisi/keadaan sasaran, misalnya dengan dimasukkannya berita-berita daerah yang sesuai dengan interaksi kelompok serta bertalian pula dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan psikologi individual.

PENUTUP

Dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa maka tugas komunikasi adalah menyebarkan pesan-pesan. Sebagian bersifat langsung melalui kontak yang lebih leluasa dan sebagian lagi melalui usaha-usaha meningkatkan intelegensi serta membangun jenis pergaulan hidup yang lebih bersifat kemanusiaan. Komunikasi dapat lebih efektif jika dilandasi kesadaran bahwa masalah yang hakiki adalah bahwa semua orang berhak menangani segala sesuatu yang menyangkut kehidupannya sendiri. Kesepakatan untuk hidup berbangsa dan bernegara dalam kesatuan dapat disosialisasikan dan dipesankan dengan cara-cara komunikasi yang memperhatikan faktor-faktor kemanusiaan, dengan menanamkan kesan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab dan urusan setiap pribadi masyarakat Indonesia, bukan hanya cita-cita pemerintah atau impian para pemimpin. Dalam kondisi yang demikian masyarakat adalah obyek sekaligus subyek yang dinamis dan memiliki nilai sosial dan kultural yang harus diperhatikan di dalam setiap penyampaian pesan. Pemerintah perlu menciptakan iklim yang sehat dalam kehidupan pers maupun mass media yang lain dengan memberikan keseimbangan antara penyampaian pesan-pesan dan informasi dengan penampungan ide maupun aspirasi masyarakat sebagai cerminan kehidupan demokrasi sesuai dengan amanat pasal 28 UUD 1945.

Pesan-pesan pemerintah boleh disampaikan setiap waktu, ideologi dapat diajarkan secara kontinu dan merata, program-program mass media bisa disatukan dengan cita-cita kesatuan ideologi dan pers dapat ditugasi menggeleorakan semangat pengabdian dan memperkuat kesatuan dan persatuan, namun tanpa komunikasi dengan pendekatan interpersonal yang persuasif, tanpa penghargaan terhadap kritik, serta mengabaikan sasaran sebagai individu dengan latar belakang sosio-kulturalnya yang khas tampaknya sulit membawaikan perubahan tingkah laku dan kondisi seperti yang diharapkan, yang berarti dapat mempersulit usaha-usaha sosialisasi kesatuan dan persatuan bangsa.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa buku-buku dan terbitan berkala:

BUKU-BUKU

Berbagai buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggeris, hasil penulisan staf CSIS mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hukum, sosial budaya dan lain-lain.

ANALISA

Majalah bulanan, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Harga per eks Rp 750,— langganan setahun (12 nomor) Rp 9.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp 6.750,—

THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulanan berbahasa Inggeris, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkut-paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp 1.000,— langganan setahun (4 nomor) Rp 4.000,— untuk Mahasiswa Rp 3.200,—

DOKUMENTASI

Kumpulan clipping berbagai surat kabar/bulletin secara sistematis mengenai masalah-masalah tertentu.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 s/d 356535

Untuk menunjang kegiatan pengkajian, CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN dan BIRO INFORMASI DAN DATA — CSIS
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160, Telepon 356532 - 35